

## Golput Dalam Pilkada

### Golput Dalam Pilkada

Alasan yang sifatnya administratif dan teknis/ individual menjadi sebab utama seseorang tidak ikut dalam pemilihan. **Hlm 1**

### Golput: Seberapa Berdampak Bagi Perolehan Suara Kandidat?

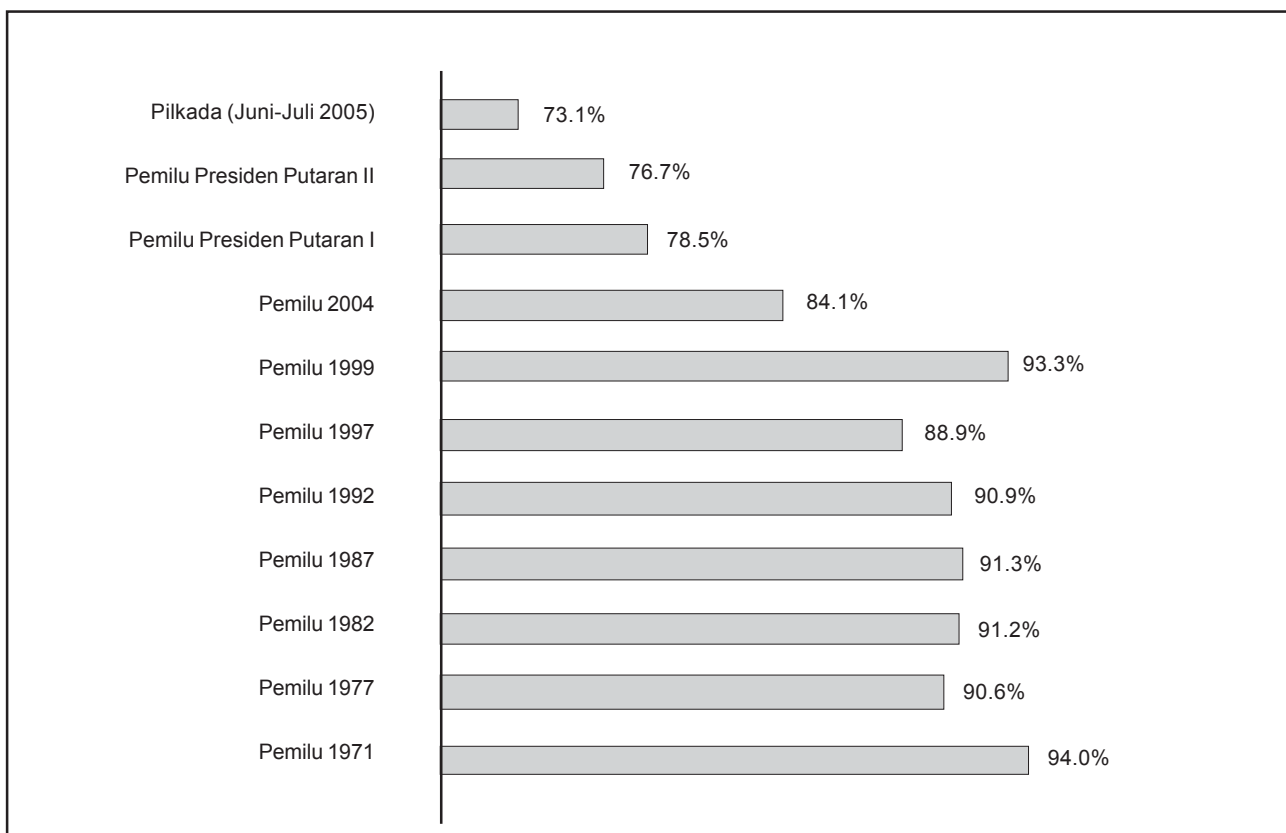
Survei golput pada Pilkada DKI Jakarta, Agustus 2007 menunjukkan, mereka yang golput lebih banyak memilih pasangan Fauzi Bowo-Priyanto dibandingkan Adang Darajatun-Dani Anwar. **Hlm 21**

**P**ILKADA ditandai dengan tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya—sering disebut sebagai golput. Jika dibuat rata-rata, tingkat golput selama pelaksanaan Pilkada mencapai angka 27.9%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan golput pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Putaran I, dan Pemilu Presiden Putaran II. Meskipun tingginya angka golput menjadi gejala umum dalam Pilkada di banyak wilayah—dan kemungkinan fenomena Golput ini juga akan menjadi gejala umum Pemilu Indonesia di masa mendatang—hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih memilih golput. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merancang riset terhadap pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan ( golput) ini. Riset ini bukan survei pra pemilihan. Riset ini dilakukan pada saat pemilihan. Responden diambil dari pemilih yang terdaftar dalam DPT ( Daftar Pemilih Tetap), tetapi tidak ikut memilih di hari pencoblosan. Riset ini menunjukkan paling tidak ada tiga alasan seseorang tidak ikut dalam pemilihan. Pertama, alasan administratif—seperti tidak mendapat surat undangan, atau belum memperoleh kartu pemilih. Kedua, alasan individual atau teknis, seperti sedang bekerja, ada keperluan pribadi di saat hari pemilihan. Ketiga, alasan politis, yakni menganggap Pilkada tidak ada gunanya dalam meningkatkan kehidupan lebih baik. Riset ini menunjukkan, alasan yang sifatnya administratif dan teknis/ individual menjadi sebab utama seseorang tidak ikut dalam pemilihan. Klaim bahwa seseorang memilih golput sebagai bentuk protes terhadap penyelenggaraan Pilkada, tidaklah sebesar yang diduga selama ini.

SALAH satu gejala penting dari Pilkada hingga saat ini adalah tingginya angka pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan (golput). Di sejumlah wilayah, angka golput ini bahkan mencapai hampir separoh—seperti yang terjadi dalam Pilkada Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kota Jayapura, Kota Depok dan Provinsi Kepulauan Riau.<sup>1</sup> Tidak jarang, jumlah golput ini lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara pemenang Pilkada. Jika dibuat rata-rata, tingkat golput selama pelaksanaan Pilkada mencapai angka 27.9%.

Jika kita bandingkan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden, rata-rata golput Pilkada ini lebih besar (lihat Grafik 1). Pemilu selama Orde Baru mempunyai partisipasi pemilih rata-rata di atas 90%. Atau tingkat golput rata-rata di bawah 10%. Pemilu 1999, diikuti oleh 93.3% dari total pemilih terdaftar. Atau hanya 6.7% saja pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Partisipasi pemilih ini turun menjadi 84.1% pada Pemilu Legislatif 2004. Angka partisipasi pemilih ini makin turun saat Pemilu presiden, baik putaran pertama maupun kedua, dan turun lagi selama pelaksanaan Pilkada.

**Grafik 1: Partisipasi Pemilih ( Voter turnout) Dalam Beberapa Pemilu dan Pilkada**



Keterangan: Partisipasi pemilih (*voter turnout*) yang dimaksud adalah prosentase pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih—pemilih menggunakan hak suaranya meski suaranya tidak sah. Perhitungan diperoleh dari jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar. Pemilu 1971-1999, diambil dari IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002, hal. 139. Data Pemilu 2004 diambil dari KPU. Data Pilkada diolah dari Desk Pilkada Depdagri, 2005. Data Desk Pilkada Depdagri ini hanya menyertakan Pilkada yang berlangsung antara Juni-Juli 2005 (total 167 Pilkada).

<sup>1</sup> Di Kota Surabaya, dari 2.013. 680 pemilih yang terdaftar, hanya 999.591 pemilih saja yang menggunakan haknya (angka partisipasi pemilih hanya 49.64%). Di Kota Medan, hanya 54.70% dari total 1.459.185 pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya. Di Kota Banjarmasin, sebanyak 52.38% dari total 466.187 pemilih terdaftar ikut memilih. Sementara di Kota Jayapura, dari 171.611 pemilih yang terdaftar, hanya 53.19% saja yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau, dari total 925.874 pemilih yang terdaftar, hanya sebanyak 54.66% pemilih saja yang akhirnya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya. Data-data mengenai jumlah pemilih ini dikutip dari Desk Pilkada, Departemen Dalam Negeri, 2005.

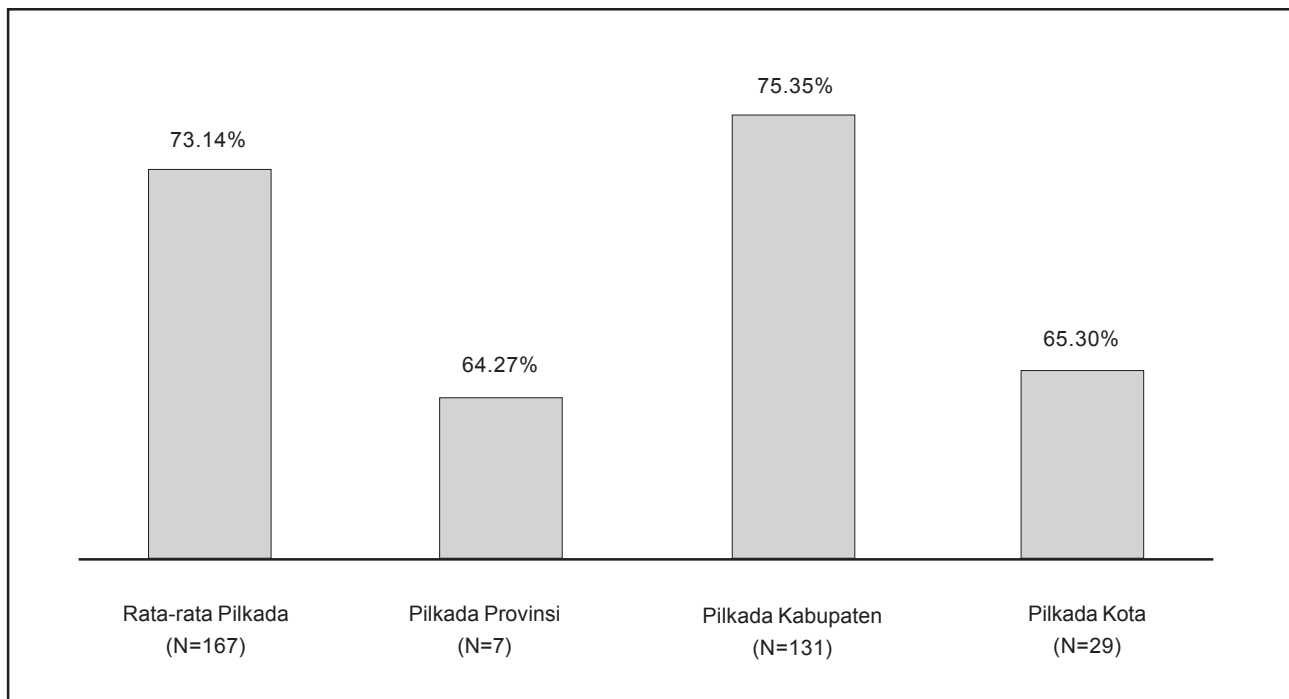
Tingkat partisipasi pemilih selama Pilkada yang cukup rendah ini memang tidak terjadi secara merata di semua Pilkada. Di sejumlah wilayah, partisipasi pemilih dalam Pilkada cukup tinggi. Sebut misalnya Pilkada di Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat) yang diikuti oleh 96.21% pemilih. Atau Pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku) yang diikuti oleh 92.31% dari total pemilih. Tingkat partisipasi pemilih juga beragam tergantung pada tingkatan atau jenis Pilkada. Pilkada wilayah Kota, umumnya partisipasi pemilih rendah. Rata-rata, partisipasi pemilih untuk Pilkada wilayah Kota ini adalah 65.3%. Sementara untuk pilkada wilayah Kabupaten, partisipasi pemilih lebih tinggi. Rata-rata partisipasi pemilih dalam Pilkada wilayah Kabupaten adalah 75.35% (lihat Grafik 2).

Grafik 3 menyajikan data lebih detail sebaran prosentase partisipasi pemilih di sejumlah Pilkada. Dari grafik ini terlihat, ada wilayah dengan partisipasi pemilih yang tinggi (di atas 90%), tetapi ada juga wilayah dengan partisipasi pemilih yang rendah (di bawah 50%). Total dari data 167 wilayah yang dianalisis, sebagian besar partisipasi pemilih berada di kisaran 70-80%.

Tabel 1 merinci prosentase partisipasi pemilih Pilkada itu menurut wilayah, kabupaten / kota dan pulau. Dari tabel ini ada sejumlah informasi yang menarik. Pilkada di wilayah Nusa Tenggara/Bali/Papua/Maluku mempunyai partisipasi pemilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada di wilayah lain. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah terdapat di Pulau Jawa, di mana sebagian besar (43.3%) partisipasi pemilih berada di kisaran angka 60.1-70%. Data lain yang menarik adalah, rendahnya partisipasi pemilih untuk Pilkada di wilayah Kota. Sebanyak 24.1% dari total pelaksanaan Pilkada di wilayah Kota yang dianalisis, partisipasi pemilih berada di kisaran angka 50.1-60%.

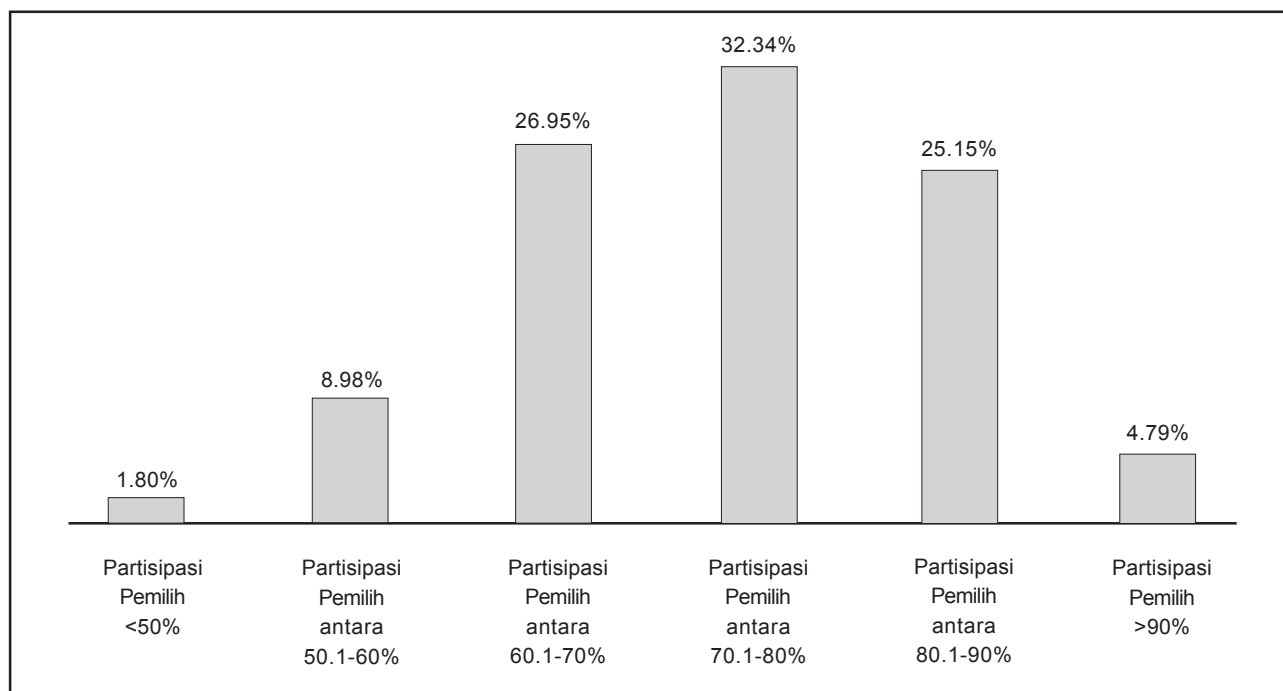
Pilkada berlangsung kurang lebih satu tahun setelah Pemilu Legislatif 2004. Menarik untuk membandingkan apakah partisipasi pemilih Pilkada di sejumlah wilayah lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu Legislatif. Grafik 4 memperlihatkan persentase partisipasi pemilih Pilkada dan Pemilu Legislatif 2004. Dari grafik ini terlihat, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada. Total

**Grafik 2: Perbandingan Partisipasi Pemilih (*Voter turnout*) Dalam Pilkada Provinsi, Kabupaten dan Kota**



Keterangan: Data hanya menyertakan Pilkada yang dilakukan antara bulan Juni-Juli 2005 (total 167 buah Pilkada). Data diolah dari Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri, 2005. Data ini memang tidak mencerminkan gambaran sesungguhnya dari Pilkada yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 250 wilayah di Indonesia. Meski demikian, Pilkada bulan Juni-Juli 2005 tetap bisa menunjukkan gambaran umum, mengingat Pilkada di bulan ini dilaksanakan secara serentak hampir di semua provinsi di Indonesia.

**Grafik 3: Sebaran Prosentase Partisipasi Pemilih Dalam Sejumlah Pilkada**



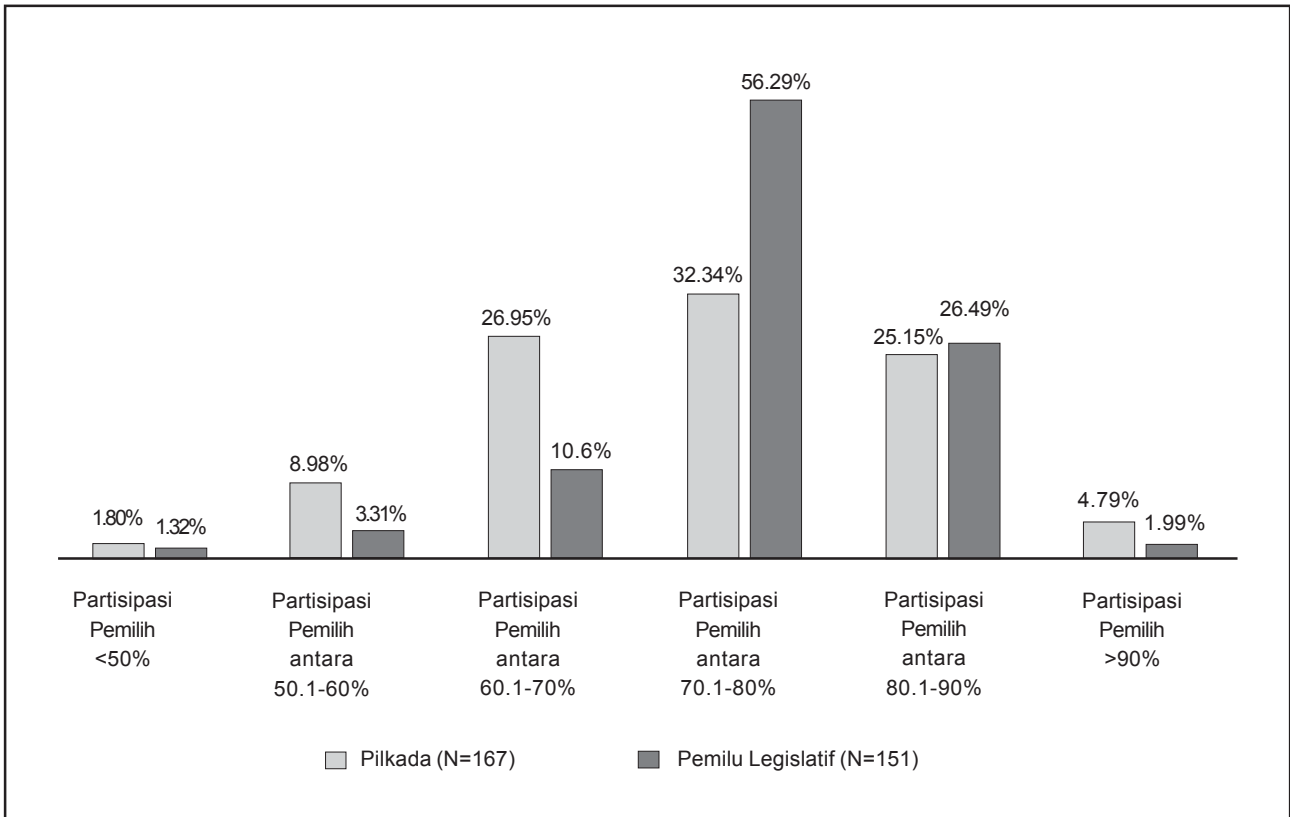
Keterangan: Data hanya menyertakan Pilkada yang dilakukan antara bulan Juni-Juli 2005 ( total 167 buah Pilkada). Data diolah dari Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri, 2005.

**Tabel 1: Sebaran Prosentase Partisipasi Pemilih Dalam Sejumlah Pilkada Menurut Wilayah, Kabupaten / Kota dan Pulau**

Kategori	Tingkat Partisipasi Pemilih ( <i>Voter turnout</i> )					
	< 50%	Antara 50.1-60%	Antara 60.1-70%	Antara 70.1-80%	Antara 80.1-90%	> 90%
<b>Wilayah</b>						
Provinsi ( N =7)	0.0%	14.3%	71.4%	14.3%	0%	0%
Kabupaten /kota (N=160)	1.9%	8.8%	25.0%	33.1%	26.3%	5.0%
<b>Kabupaten / Kota</b>						
Kabupaten ( N= 131)	0.8%	5.3%	24.4%	32.8%	30.5%	6.1%
Kota ( N =29)	6.9%	24.1%	27.6%	34.5%	6.9%	0%
<b>Pulau</b>						
Jawa ( N= 30)	3.3%	6.7%	43.3%	40.0%	3.3%	3.3%
Sumatera (N= 53)	0.0%	17.0%	37.7%	39.6%	5.7%	0.0%
Kalimantan ( N=17)	0.0%	5.9%	17.6%	41.2%	29.4%	5.9%
Sulawesi (N= 27)	3.7%	3.7%	14.8%	33.3%	44.4%	0.0%
Nusa Tenggara/ Maluku/ Papua/Bali (N= 40)	2.5%	5.0%	12.5%	12.5%	52.5%	15.0%

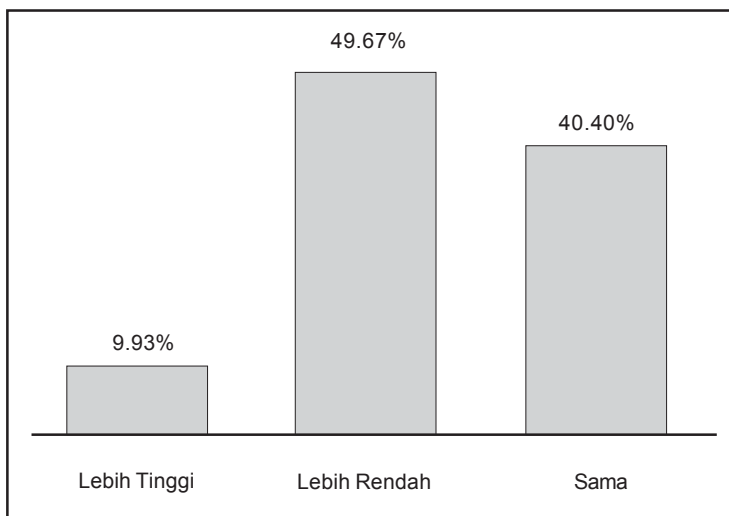
Keterangan: Data hanya menyertakan Pilkada yang dilakukan antara bulan Juni-Juli 2005 ( total 167 buah Pilkada). Data diolah dari Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri, 2005.

**Grafik 4: Prosentase Partisipasi Pemilih (Voter turnout) Pilkada dan Pemilu Legislatif 2004**



Keterangan: Data partisipasi pemilih Pilkada diolah dari Pilkada yang dilakukan antara bulan Juni-Juli 2005 ( total 167 buah Pilkada). Untuk Pemilu Legislatif, data diolah dari wilayah yang melangsungkan Pilkada antara Juni-Juli 2005. Ada 16 wilayah pemekaran, karena itu data menyertakan 151 wilayah. Data diolah dari Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri, 2005 dan data KPU, 2004.

**Grafik 5: Perbandingan Partisipasi Pemilih (Voter turnout) Pilkada dan Pemilu Legislatif 2004**



Keterangan: Perbandingan dilakukan dengan membandingkan angka partisipasi pemilih Pilkada dan Pemilu Legislatif. Partisipasi pemilih Pilkada dikategorikan “sama” apabila selisih partisipasi pemilih Pilkada dengan Pemilu Legislatif tidak lebih dari 5%; dikategorikan “ lebih tinggi” jikalau selisih partisipasi pemilih Pilkada lebih tinggi di atas 5% dibanding partisipasi pemilih Pemilu Legislatif; dan dikategorikan “lebih rendah” jikalau partisipasi pemilih Pilkada lebih rendah di atas 5% dibanding partisipasi pemilih Pemilu Legislatif. Data diolah dari Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri, 2005 dan data KPU, 2004.

dari wilayah yang dianalisis, separoh diantaranya (49.6%) ditandai dengan partisipasi pemilih Pilkada lebih rendah dibandingkan dengan Pemilu Legislatif. Hanya 9.93% wilayah saja di mana partisipasi pemilih dalam Pilkada lebih tinggi dibanding Pemilu Legislatif (lihat Grafik 5).

Tabel 2 merinci lebih detail perbandingan partisipasi pemilih selama Pilkada dengan Pemilu Legislatif menurut wilayah, kabupaten / kota dan pulau. Dari tabel ini terlihat, kelesuan pemilih untuk mengikuti Pilkada paling nampak terlihat di Pulau Jawa. Sebagian besar (86.7%) Pilkada di Pulau Jawa yang dianalisis ditandai dengan partisipasi pemilih yang lebih rendah dibanding selama pelaksanaan Pemilu legislatif. Sementara untuk wilayah di Nusa Tenggara/ Maluku/Papua/Bali, partisipasi pemilih relatif stabil antara Pilkada dan Pemilu legislatif.

Pertanyaan yang menggelitik, apakah partisipasi pemilih (*voter turnout*) selama Pilkada rata-rata sebesar 73.1% ini termasuk tinggi atau rendah? Apakah tingkat partisipasi pemilih itu layak kita khawatirkan atukah partisipasi itu sudah termasuk tinggi sehingga tidak perlu lagi kita risaukan? Ini hanya bisa dijawab dengan membandingkan partisipasi pemilih di Indonesia dengan di sejumlah nega-

ra lain. Grafik 6 memperlihatkan angka partisipasi pemilih di sejumlah negara yang disusun berdasar kawasan benua. Angka partisipasi pemilih sebesar 73.1% ini lebih rendah dibanding dengan rata-rata partisipasi pemilih di negara-negara Eropa. Tetapi angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata partisipasi pemilih di negara Afrika yang hanya 64.5%.

#### Mengapa Tidak Memilih: Tinjauan Teoritis

Secara teoritis, ada dua penjelasan teori mengapa seseorang tidak ikut memilih dalam pemilihan. Penjelasan pertama bersumber dari teori-teori mengenai perilaku pemilih (*voter behavior*). Penjelasan ini memusatkan perhatian pada individu. Besar kecilnya partisipasi pemilih (*voting turnout*) dilacak pada sebab-sebab dari individu pemilih.

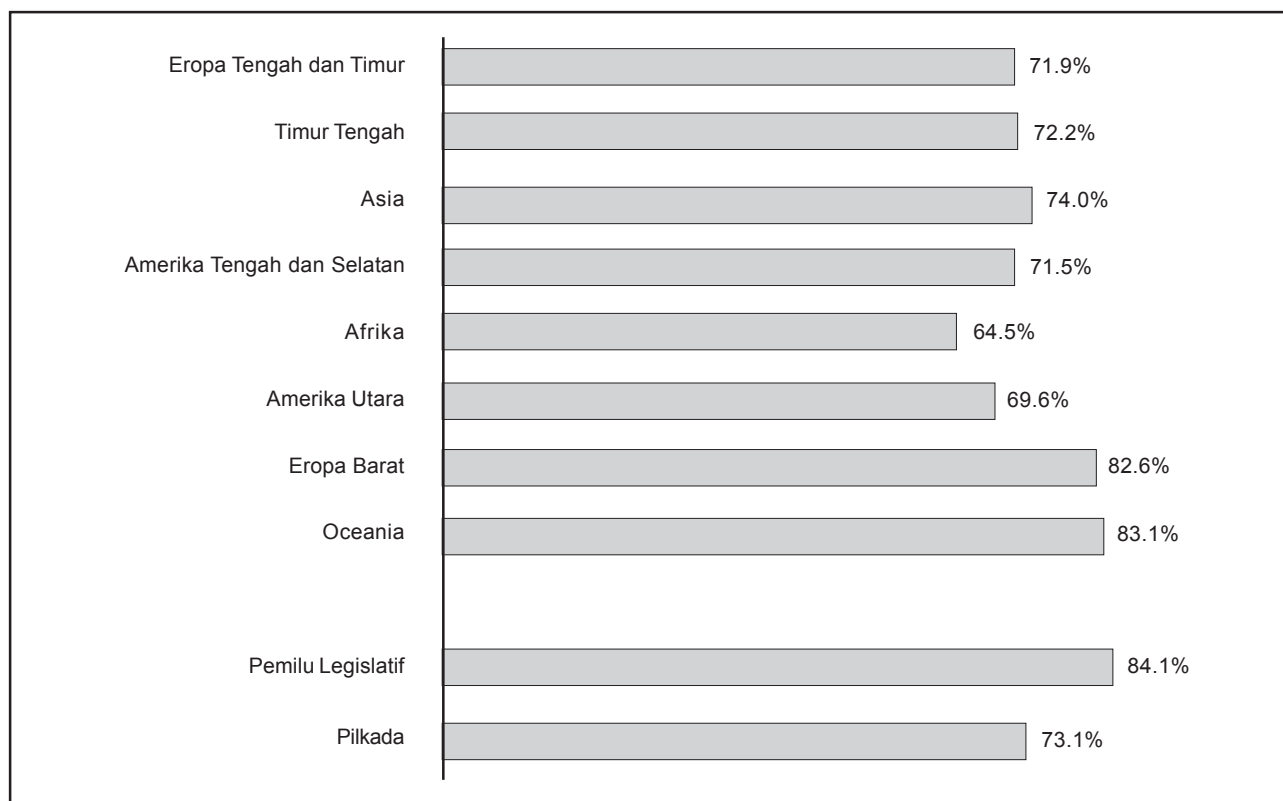
Ada tiga teori besar yang menjelaskan mengapa seseorang tidak memilih ditinjau dari sudut pemilih ini. Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya.<sup>2</sup> Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau

**Tabel 2: Perbandingan Partisipasi Pemilih (*Voter turnout*) Pilkada dan Pemilu Legislatif 2004 Menurut Wilayah, Kabupaten / Kota dan Pulau**

	Partisipasi pemilih ( <i>Voter turnout</i> ) Pilkada dibanding Pemilu Legislatif 2004		
	Lebih tinggi	Lebih rendah	Sama / Stabil
<b>Wilayah</b>			
Provinsi ( N =7)	14.3%	71.4%	14.3%
Kabupaten /kota ( N=144)	9.7%	48.6%	41.7%
<b>Kabupaten / Kota</b>			
Kabupaten ( N= 115)	3.4%	62.1%	34.5%
Kota ( N =29)	11.3%	45.2%	43.5%
<b>Pulau</b>			
Jawa ( N= 30)	0.0%	86.7%	13.3%
Sumatera (N= 48)	14.6%	56.3%	29.2%
Kalimantan ( N= 17)	5.9%	41.2%	52.9%
Sulawesi (N= 24)	8.3%	33.3%	58.3%
Nusa Tenggara/ Maluku/Papua/Bali (N= 32)	15.6%	21.9%	62.5%

Sumber: Data diolah dari Desk Pilkada Departemen Dalam Negeri, 2005 dan data KPU, 2004.

<sup>2</sup> Di tiap wilayah atau negara faktor sosiologis ini akan memberi dampak berbeda. Di Amerika, orang yang berpendidikan tinggi relatif lebih peduli dengan pemilihan dan cenderung menggunakan hak pilihnya, dibandingkan dengan warga yang berpendidikan rendah. Sebaliknya di negara-negara berkembang (seperti di India atau Indonesia), masyarakat berpendidikan rendah justru yang lebih aktif berpartisipasi dalam pemilihan. Kelompok masyarakat terdidik di kota justru mempunyai tingkat partisipasi lebih rendah.

**Grafik 6: Perbandingan Partisipasi Pemilu / Pilkada di Indonesia Dengan Negara Lain (Menurut Benua)**

Keterangan: Partisipasi pemilih (*voter turnout*) di sejumlah negara menurut benua yang diambil di sini adalah partisipasi pemilih untuk Pemilu Legislatif (pemilihan anggota parlemen). Data dikutip dari IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002, hal. 80-82.

tidak. Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. Ketiga, teori ekonomi politik. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Selain teori yang memusatkan perhatian pada individu pemilih, fenomena *voting turnout* juga bisa dijelaskan dengan teori dari sisi struktur. Di sini besar kecilnya partisipasi pemilih tidak diterangkan dari sudut pemilih, tetapi dari struktur atau sistem suatu negara. Paling tidak ada tiga penjas yang umum dipakai oleh pengamat atau ahli. Pertama, sistem pendaftaran (registrasi) pemilih. Untuk bisa memilih, umumnya calon pemilih harus terdaftar sebagai pemilih terlebih dahulu. Kemudahan dalam pendaftaran pemilih bisa mempengaruhi minat seseorang untuk terlibat dalam pemilihan. Sebaliknya, sistem pendaftaran yang rumit dan tidak teratur bisa mengurangi minat orang dalam pemilihan.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Secara umum ada dua sistem registrasi (pendaftaran) pemilih. Pertama, sistem yang mewajibkan pemilih untuk mendaftar. Di sini negara secara aktif akan mendaftar pemilih yang mempunyai syarat sebagai pemilih. Kedua, sistem yang membebaskan pemilih untuk mendaftar atau tidak sebagai pemilih. Pemilih punya hak untuk menolak didaftar sebagai pemilih jika tidak menginginkannya. Sistem yang pertama akan menghasilkan partisipasi pemilih (*voting turnout*) yang tinggi. Misalnya di Prancis. Warga yang berumur 18 tahun secara otomatis akan didaftar sebagai pemilih. Tidak mengherankan jikalau Prancis adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat *voting turnout* lumayan tinggi. Rata-rata *voting turnout* dalam sejumlah pemilihan umum di Prancis adalah 76%. Dikutip dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Voter\\_turnout](http://en.wikipedia.org/wiki/Voter_turnout). Lihat juga Rafael Lopez Pintor and Maria Gratschew, "Voter Registration and Inclusive Democracy: Analysing Registration Practices Worldwide" dalam IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002.

**Tabel 3 : Pemilu and Voter Turnout Dari Tahun 1945 – 2001 di Negara-Negara Oceania**

No	Negara	Jumlah Pemilu Yang Pernah Dilakukan	Voter Turnout
1.	Australia	22	94,5 %
2.	Nauru	5	92,4 %
3.	Selandia Baru	19	90,8 %
4.	Cook Island	1	89,0 %
5.	Western Samoa	3	82,3 %
6.	Tuvalu	2	81,9 %
7.	Palau	6	81,7 %
8.	Fiji	3	81,0 %
9.	Kiribati	4	77,9 %
10.	Vanuatu	5	68,3 %
11.	Papua Nugini	8	64,1 %
12.	Kepulauan Solomon	4	63,8 %
13.	Tonga	4	56,3
	Rata-Rata	86	83,1 %

Sumber : IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002, hal. 80-81

**Tabel 4 : Pemilu and Voter Turnout Dari Tahun 1945 – 2001 di Negara-Negara Eropa Barat**

No	Negara	Jumlah Pemilu Yang Pernah Dilakukan	Voter Turnout
1.	Liechtenstein	17	92,8 %
2.	Belgia	18	92,5 %
3.	Austria	17	91,3 %
4.	Italia	15	89,8 %
5.	Luksemburg	12	89,7 %
6.	Ciprus	7	89,7 %
7.	Iceland	17	89,5 %
8.	Malta	14	88,2 %
9.	Belanda	16	87,5 %
10.	Swedia	17	87,1 %
11.	Denmark	22	85,9 %
12.	Jerman	14	85,4 %
13.	Andorra	3	81,4 %
14.	Turki	10	81,3 %
15.	Norwegia	15	80,4 %
16.	Yunani	16	79,9 %
17.	San Marino	7	78,4 %
18.	Portugal	10	77 %
19.	Finlandia	16	76 %
20.	Inggris	16	75,2 %
21.	Perancis	15	73,8 %
22.	Spanyol	8	73,6 %
23.	Irlandia	16	73,3 %
24.	Monako	7	70,9 %
25.	Switzerland	14	56,5 %
	Rata-Rata	339	82,6 %

**Tabel 5: Pemilu and Voter Turnout Dari Tahun 1945 – 2001 di Negara-Negara Amerika Utara**

No	Negara	Jumlah Pemilu Yang Pernah Dilakukan	Voter Turnout
1.	Bahama	6	91,9 %
2.	Aruba	3	78,5 %
3.	Dominica	12	74,4 %
4.	St. Kitts & Nevis	11	72,2 %
5.	Kanada	18	73,9 %
6.	St. Vincent & The Grenadines	14	72,2 %
7.	Grenada	6	70,3 %
8.	Anguilla	8	69,5 %
9.	Barbados	11	68,8 %
10.	Jamaika	12	68,1 %
11.	Republik Dominika	6	66,6 %
12.	Amerika Serikat	17	66,5 %
13.	St. Lucia	12	64,1 %
14.	Trinidad & Tobago	12	63,3 %
15.	Antigua & Barbuda	11	62,2 %
16.	Haiti	3	47,1 %
	Rata-Rata	162	69,6 %

Sumber : IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002, hal. Hal 80-81.

**Tabel 6: Pemilu and Voter Turnout Dari Tahun 1945 – 2001 di Negara-Negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan**

No	Negara	Jumlah Pemilu Yang Pernah Dilakukan	Voter Turnout
1.	Guyana	7	88,5 %
2.	Argentina	18	84,2 %
3.	Bolivia	11	82,2 %
4.	Belize	5	80,4 %
5.	Peru	9	80,3 %
6.	Venezuela	10	80 %
7.	Uruguay	11	80 %
8.	Chili	11	78,9 %
9.	Paraguay	9	78,3 %
10.	Brazil	14	77,8 %
11.	Costa Rica	12	77,7 %
12.	Nicaragua	6	75,9 %
13.	Panama	4	75,5 %
14.	Suriname	6	74,2 %
15.	Honduras	11	72,8 %
16.	Ekuador	12	68,9 %
17.	Meksiko	19	65,2 %
18.	Guatemala	16	51,6 %
19.	El Savador	11	49,6 %
20.	Kolumbia	18	47,6 %
	Rata-Rata	220	71,5 %

Sumber : IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002, hal. 80-81

Tabel 7: Pemilu and Voter Turnout Dari Tahun 1945 – 2001 di di Negara-Negara Asia

No	Negara	Jumlah Pemilu Yang Pernah Dilakukan	Voter Turnout
1.	Singapura	8	93,5 %
2.	Indonesia	7	91,5 %
3.	Mongolia	4	91,1 %
4.	Kamboja	2	90,3 %
5.	Thailand	15	88,3 %
6.	Timor Timur	1	86 %
7.	Filipina	7	80,9 %
8.	Sri Lanka	11	74,3 %
9.	Korea Selatan	10	72,9 %
10.	Maldives	2	72 %
11.	Malaysia	6	71,5 %
12.	Taiwan	5	70,5 %
13.	Jepang	22	69,5 %
14.	Nepal	7	69,1 %
15.	Burma	2	62,7 %
16.	India	13	59,4 %
17.	Bangladesh	6	58,2 %
18.	Pakistan	6	45,3 %
	Rata-Rata	134	74 %

Sumber : IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002, hal. 80-81

Kedua, sistem kepartaian dan pemilihan umum suatu negara. Sejumlah penelitian menunjukkan, sistem dua partai relatif bisa mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Motivasi pemilih untuk ikut memilih bisa surut ketika partai atau calon yang maju dalam pemilihan tidak ada yang disukai. Sebaliknya negara yang menganut sistem multi-partai relatif bisa memancing partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Hal ini karena pemilih lebih punya banyak pilihan dan alternatif. Sejumlah penelitian juga menunjukkan, sistem proporsional lebih membuat partisipasi pemilih lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan sistem distrik. Keterwakilan proporsional pada umumnya dipercaya dapat meningkatkan kehadiran pemilih karena semua partai dapat meningkatkan keterwakilan mereka (Russel J. Dalton dan Martin P. Wattenberg, 1993).

Ketiga, sifat pemilihan. Apakah pemilihan itu merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara. Ada negara yang menganut paham bahwa pemilihan umum adalah hak bagi warga negara, karenanya warga bisa memilih dan bisa juga tidak memilih. Tidak ada hukuman bagi warga negara yang tidak ikut memilih. Tetapi ada juga negara yang memandang pemilihan umum sebagai kewajiban dari warga negara. Warga diwajibkan untuk ikut pemilihan dan jika tidak ikut akan mendapat hukuman. Bentuk hukuman ini bermacam-macam—dari hukuman denda, penambahan pajak hingga ancaman tidak mendapat jaminan atau asuransi dari negara.<sup>4</sup> Negara yang menerapkan hukuman bagi warga yang tidak terlibat dalam pemilihan bisa dipastikan mempunyai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi.

<sup>4</sup> Salah satu contoh adalah Australia. Rata-rata tingkat *voter turnout* di Australia adalah 95%—Australia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat partisipasi pemilih paling tinggi di dunia. Australia menerapkan hukuman denda bagi pemilih yang tidak ikut memilih. Hukuman ini bisa berujung penjara jika calon pemilih ini tidak membayar denda yang harus dibayar. Australia bukan satu-satunya negara yang menerapkan denda bagi warga yang tidak ikut memilih. Swis, Austria, Cyprus, Argentina, Peru adalah contoh negara lain yang menerapkan hukuman denda. Selain hukuman, mekanisme lain untuk “mewajibkan” pemilih datang di hari pemilihan adalah memberikan surat keterangan. Surat keterangan ini dipakai ketika seseorang melamar pekerjaan terutama di kantor-kantor pemerintah. Di Belgia dan Mexico, pemilih yang tidak ikut pemilihan tanpa alasan jelas, bisa dipastikan akan kesulitan mendapat pekerjaan di kantor pemerintah. Kesulitan yang sama juga dialami ketika mengurus surat dan dokumen dari kantor pemerintah. Semua negara yang mewajibkan warga negaranya ikut memilih ini, dikenal mempunyai tingkat *voter turnout* tinggi. Lihat Maria Gratschew, “Compulsory Voting”, dalam IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002.

Untuk konteks Indonesia, penjelasan mana yang lebih berlaku dalam menerangkan fenomena golput? Untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, Lingkaran Survei Indonesia melakukan survei golput. Survei ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, 8 Agustus lalu (lihat selengkapnya mengenai gambaran dan metodologi survei dalam box: Bagaimana Survei Golput Ini Dilakukan?). Survei Golput adalah survei yang dirancang khusus untuk identifikasi pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput). Informasi mengenai golput, selama ini diperoleh dari survei pra pemilihan. Berbagai lembaga membuat survei dan menanyakan kepada pemilih apakah akan ikut pemilihan atau tidak. Responden yang menjawab tidak akan ikut pemilihan, lalu diidentifikasi sebagai golput. Dalam banyak pengalaman, informasi yang didapat dari survei ini kurang bisa mengidentifikasi adanya golput.<sup>5</sup> Riset ini akan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan survei pra pemilihan. Riset dilakukan setelah pemilihan, sehingga akan diidentifikasi secara tepat orang yang benar-benar tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini berbeda dengan survei pra pemilihan yang lebih berupa proyeksi—perkiraan orang yang tidak menggunakan haknya. Populasi dari survei ini adalah pemilih yang tidak menggunakan haknya. Dengan identifikasi yang lebih tepat terhadap golput, akan bisa diidentifikasi secara lebih akurat pula alasan-alasan orang memilih golput.

### Karakteristik Golput

Salah satu pertanyaan menarik seputar pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) adalah karakter atau profil mereka. Tabel 8 dan 9 menyajikan data mengenai profil golput. Yang menarik dari data ini adalah gambaran mengenai golput berbeda dengan pandangan umum. Golput kerap dihubungkan dengan kelas menengah terpelajar sebagai bagian dari protes terhadap pelaksanaan Pilkada. Data di dalam tabel 8 menunjukkan, golput tersebar secara merata di semua jenjang pendidikan. Golput selama ini juga kerap dihubungkan dengan warga masyarakat yang bekerja harian—mendapatkan upah secara harian (tukang ojek, sopir, penjaja makanan dan

sebagainya). Kenyataannya, golput juga banyak terjadi pada warga yang mempunyai pekerjaan berkategori bulanan (mendapat gaji atau pendapatan tiap bulan sekali)

### Alasan Golput

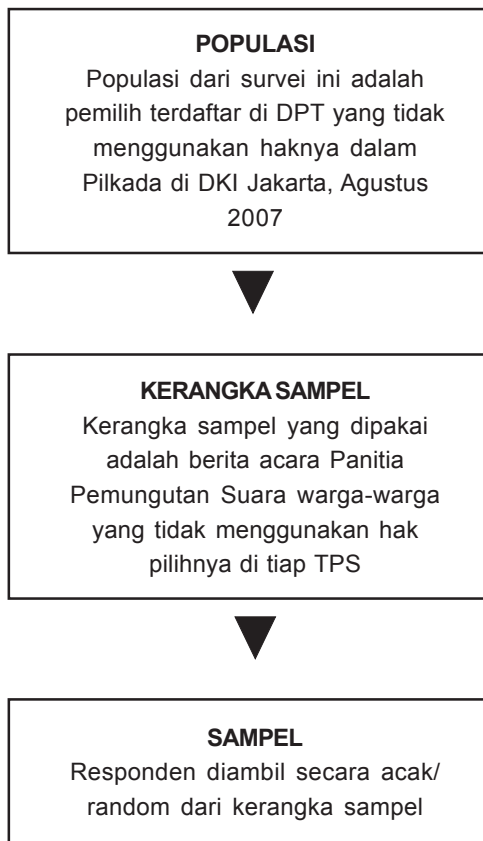
Survei menanyakan kepada responden, apa alasan mereka tidak datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) padahal nama mereka terdaftar sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh responden. Grafik 7 memperlihatkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh responden.

Dari alasan yang dikemukakan oleh responden ini, kita bisa membagi alasan tidak ikut pemilihan (golput) dalam tiga kategori besar. Pertama, alasan administratif. Seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi—seperti tidak tahu nama terdaftar dalam daftar pemilih, belum mendapat kartu pemilih atau kartu undangan. Riset ini menemukan sebanyak 31.6% responden tidak memilih karena tidak memiliki kartu pemilih. Ini menunjukkan adanya kekacauan sistem administrasi pendaftaran pemilih. Seseorang tidak mendapat kartu pemilih padahal namanya masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kedua, alasan teknis. Seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih—seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota di saat hari pemilihan dan sebagainya. Atau bisa juga karena malas pergi ke Tempat Pemungutan Suara. Pemilih tahu namanya terdaftar sebagai pemilih tetapi enggan datang ke TPS.

Ketiga, alasan politis. Pemilih memutuskan tidak menggunakan haknya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih. Pilkada dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan, atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya. Di sini seseorang memutuskan tidak memilih sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan, baik terhadap penyelenggaraan Pilkada maupun calon yang maju dalam Pilkada.

<sup>5</sup> Ini ditandai dengan adanya perbedaan antara responden yang menyatakan ikut pemilihan (dalam survei pra pemilihan) dengan angka riil orang yang tidak ikut memilih. Dalam banyak survei, jumlah partisipasi pemilih dilaporkan lebih dari 90%. Atau angka golput hanya di bawah 10%. Padahal dalam kenyataannya, di sejumlah Pilkada angka Golput bisa lebih dari 30%. Dimana letak sumber ketidakakuratan ini? Ada sejumlah sebab. Pertama, survei pra pemilihan lebih merupakan proyeksi (rencana) dan bukan aktual orang yang tidak memilih. Pertanyaan yang diajukan untuk mendeteksi ada tidaknya golput biasanya dirumuskan dengan pertanyaan, “Apakah Anda akan ikut memilih dalam Pemilu mendatang?”. Responden cenderung menjawab “akan ikut memilih” padahal dalam kenyataannya bisa jadi tidak ikut memilih. Ini bisa dimengerti karena pertanyaan lebih ditujukan kepada proyeksi—rencana ikut Pemilu atau tidak beberapa bulan mendatang. Untuk konteks Indonesia, orang umumnya cenderung bersikap positif akan ikut memilih, terkecuali bagi mereka yang sejak awal tidak percaya dengan pemilihan. Kedua, Responden cenderung menjawab secara tidak jujur, karena pertanyaan ini bisa dikategorikan sebagai pertanyaan yang memalukan (*threatening question*). Orang yang tidak ikut pemilihan dipandang tidak pantas. Hal ini menyebabkan orang cenderung untuk bersikap positif dengan menjawab akan ikut pemilihan—padahal dalam kenyataannya tidak ikut dalam pemilihan.



### Bagaimana Survei Golput Ini Dilakukan?

Riset menggunakan metode survei. Responden diwawancarai secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur. Populasi dari survei ini adalah semua pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam Pilkada Kota Jakarta, 8 Agustus 2007. Jumlah dan identifikasi dari pemilih yang tidak menggunakan haknya ini dilakukan dengan mencocokkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan catatan pemilih yang menggunakan haknya. Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan haknya inilah yang diidentifikasi sebagai populasi golput dalam survei.

Kerangka sampel memasukkan semua pemilih yang tidak menggunakan haknya (golput), yakni berita acara yang dibuat oleh Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara). Peneliti tinggal menyalin saja daftar nama-nama pemilih yang tidak menggunakan haknya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sampel. Dari kerangka sampel ini akan diambil secara acak (*random*) sampel.

Teknik penarikan sampel yang dipakai menggunakan sampel acak bertahap (Multistage Random Sampling). Dari populasi semua TPS yang ada di DKI Jakarta diambil sampel TPS. Dari sampel TPS itu akan diidentifikasi nama-nama pemilih yang tidak menggunakan haknya. Total di DKI Jakarta terdapat 11.202 Tempat Pemungutan Suara. Dari 11.202 TPS yang ada di seluruh DKI Jakarta itu diambil secara acak 120 TPS. Sebelum sampel TPS diambil, dibuat proporsi terlebih dahulu berdasar jumlah populasi dari masing-masing wilayah di DKI Jakarta.

Di hari pemilihan (8 Agustus 2007), pewawancara datang ke masing-masing TPS sampel. Setelah proses perhitungan selesai, dan semua dokumen telah diisi oleh PPS, pewawancara meminta ijin untuk menyalin berita acara pemilih yang tidak hadir ke dalam lembar data pemilih golput. Data inilah yang dipakai oleh pewawancara sebagai kerangka sampel. Setelah nama semua pemilih golput telah didata, pewawancara memilih sampel responden secara acak (*random*) untuk diwawancarai. Responden dipilih dengan menggunakan lembar angka acak. Angka acak ini menjamin semua pemilih golput yang ada dalam satu TPS mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Di tiap TPS sampel, akan diambil 4 orang responden yang tidak menggunakan haknya (golput) dengan proporsi (*stratifikasi*) 2 orang responden laki-laki dan 2 orang responden perempuan. Total ada 480 orang responden yang rencananya disertakan dalam survei ini. Dalam prakteknya, muncul sejumlah kesulitan—dari responden yang tidak bisa ditemui hingga data pemilih di TPS yang tidak bisa diakses oleh pewawancara. Total responden golput yang bisa diwawancarai adalah 254 orang. Tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) survei ini adalah  $\pm 7\%$ . Selengkapnya mengenai desain riset survei golput ini bisa dilihat di [www.lsi.co.id](http://www.lsi.co.id).

Tabel 8: Karakteristik Sosiologis Demografis Golput

Karakteristik Sosiologis Golput	Persen	Populasi Penduduk Jakarta (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	50.4	50.6
Perempuan	49.6	49.4
Total	100.0	100
<b>Umur</b>		
19 Tahun atau di bawahnya	6.3	7.7
20-29 Tahun	34.3	37.8
30-39 Tahun	28.5	25.6
40-49 Tahun	20.5	15.3
50 Tahun atau di atasnya	10.5	13.6
Total	100.0	100.0
<b>Suku</b>		
Jawa	31.2	35.2
Betawi	32.8	27.6
Sunda	16.0	15.3
Minang	2.0	3.2
Lainnya	18.0	18.7
Total	100.0	100
<b>Pendidikan</b>		
Lulus SD atau di bawahnya	25.2	32.3
Tamat SLTP/ sederajat	22.0	21.5
Tamat SLTA/ sederajat	40.2	36.2
Pernah Kuliah atau di atasnya	12.6	10.0
Total	100.0	100.0
<b>Kategori Pekerjaan</b>		
Harian (mendapatkan pendapatan per hari)	20.3	
Mingguan (mendapat gaji atau pendapatan tiap minggu)	8.6	
Bulanan (mendapat gaji atau pendapatan tiap bulan)	44.5	
Tidak tentu (mendapat penghasilan sesuai dengan ada atau tidaknya pekerjaan)	14.1	
Lainnya	12.5	
Tidak bekerja	20.3	

Sumber: Survei Golput Lingkaran Survei Indonesia ( N= 254)

Dari tiga kategori alasan responden memilih golput ini, sebagian besar bisa diidentifikasi karena alasan administrasi (38.6%) dan teknis / individual (39.1%). Hanya 16.5% pemilih yang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara karena alasan politis (lihat Tabel 10). Yang menarik dari data ini adalah, mereka yang memutuskan tidak ikut memilih sebagai bentuk protes atau karena alasan yang sifatnya politis, tidaklah besar. Paling tidak, tidak sebesar yang selama ini diklaim sejumlah pengamat.<sup>6</sup> Selama ini seakan ada gambaran bahwa mereka yang tidak ikut memilih menunjukkan besarnya protes atau perlawanan dari pemilih. Riset ini menunjukkan, alasan terbesar orang tidak memilih adalah karena alasan yang sifatnya administratif dan teknis / individual. Hanya sebagian kecil saja pemilih yang memutuskan tidak ikut memilih karena alasan yang sifatnya politis.<sup>7</sup>

Untuk mengecek konsistensi jawaban responden, benarkan golput karena alasan politis cukup kecil, survei menanyakan sejumlah item pertanyaan kepada responden. Responden diminta untuk menjawab apakah setuju atau tidak jikalau ada orang yang memutuskan tidak ikut memilih karena alasan-alasan politis—dalam hal ini protes karena Pilkada hanya diikuti oleh 2 calon, protes dengan kesemrawutan proses pendaftaran pemilih dan protes adanya kecurangan Pilkada. Hasilnya, sebagian besar tidak setuju jika ada orang yang memutuskan golput karena alasan-alasan politis (lihat Grafik 8).

Grafik 9-12 menampilkan informasi mengenai alasan golput menurut usia, jenis kelamin, pendidikan dan kategori pendidikan. Dilihat dari usia, alasan tidak ikut memilih terbagi antara alasan administrasi dan teknis / individual. Hanya ada kecenderungan di kalangan pemilih pemula, golput lebih banyak terjadi karena alasan

administrasi (50%). Ini bisa dimengerti karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersumber dari daftar pemilih yang dipakai pada Pemilu 2004. Sangat mungkin terjadi akibat validasi data yang tidak baik, pemilih pemula belum terdata sebagai pemilih. Sementara jika dilihat berdasar jenis kelamin terdapat perbedaan yang menarik. Di kalangan laki-laki, golput lebih banyak terjadi karena alasan teknis / individual, sementara di kalangan wanita golput lebih banyak terjadi karena alasan administratif.

Jika dilihat berdasar jenjang pendidikan, ada kecenderungan yang menarik. Di kalangan orang yang berpendidikan tinggi, cukup besar (27.3%) proporsi golput yang terjadi akibat alasan-alasan politis seperti ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Meski pengujian secara statistik menunjukkan, tidak ada hubungan yang signifikan antara jenjang pendidikan dengan alasan golput. Di semua kelompok jenjang pendidikan, alasan administrasi dan teknis / individual, masih dominan. Bagaimana dengan kategori pekerjaan? Untuk orang yang basis pekerjaannya adalah harian (seperti tukang ojek, membuka warung, pedagang keliling dan sebagainya), sebagian besar golput karena alasan teknis—seperti sedang bekerja. Sementara untuk kategori pekerjaan lain, sebagian besar golput terbagi antara alasan administrasi dan teknis/ individual.

#### **Apa Yang Bisa Dilakukan di Masa Mendatang?**

Riset ini memperlihatkan ada tiga tipe pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput), yakni golput karena alasan politis, administratif dan teknis (individual). Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh penyelenggara Pemilu/ Pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Upaya itu bisa dirumuskan dari identifikasi pola golput.

<sup>6</sup> Lihat misalnya tulisan Fadjoel Rachman, "Golput, Pemenang Pemilu 2004", *Kompas*, 15 Mei 2004 ; "Golput, Penakluk Lima Capres 2004", *Kompas*, 22 Juli 2004. Dalam tulisan tersebut, Fadjoel Rachman melihat banyaknya pemilih yang tidak datang di hari pemilihan menandakan adanya oposisi sosial di kalangan rakyat.

<sup>7</sup> Istilah "golput" (kependekan dari golongan putih) memang sangat lekat dengan politik. Istilah ini muncul pertama kali tahun 1970-an, diperkenalkan oleh sejumlah aktivis muda saat itu, seperti Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, Husin Umar, Marsilam Simanjuntak, dan Asmara Nababan. Golput adalah gerakan moral sebagai bentuk protes terhadap UU Pemilu No.15/1969 yang dinilai mengkerdikan partai politik. Ketentuan UU tersebut untuk memangkas munculnya partai politik baru dinilai menghambat gerak demokrasi. Ketentuan tersebut juga memaksa pemilih agar memilih Partai Golkar. Pemilu hanyalah rekayasa untuk mengukuhkan kemenangan Partai Golkar. Bentuk perlawanan terhadap UU tersebut tidak dilakukan dengan demonstrasi menentang pemerintah. Para aktivis menyerukan kepada pemilih agar melawan secara "aman" dengan jalan tidak ikut dalam pemilihan. Menurut Arief Budiman, salah seorang penggagas gerakan ini, golput adalah upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk melawan kesewenangan pemerintah Orde Baru. Rakyat tidak mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan pemerintah yang didukung oleh militer. Yang bisa dilakukan oleh rakyat adalah melawan secara "diam-diam". Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari tidak datang di hari pemilihan, mencoblos di bagian putih kertas-suara, bukan pada tanda gambarnya, hingga menusuk semua tanda gambar partai politik. Setiap kali menjelang pemilihan umum, pembicaraan mengenai golput selalu muncul. Dari latar sejarah tersebut, terlihat golongan putih (golput) punya konotasi politik yang kuat. Pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya dilihat semata sebagai bentuk protes terhadap pemerintah atau sikap melawan terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Mengenai sejarah golput, lebih lanjut lihat "Jalan Sunyi Golongan Putih", *Koran Tempo*, 19 September 2004; "Geliat Golongan Putih: Makin Tampak dari Masa ke Masa", *Kompas*, 24 Februari 2004. Pandangan mengenai golput, lihat Arief Budiman "Pemilihan Umum 1997: Golput Sebagai Senjata Kaum Lemah", *D&R*, Edisi 45/01 - 04/Jan/1997; "Pemilu Ola-Elu", *D&R*, Edisi03/02 - 22/Mar/1997.

Tabel 9: Karakteristik Psikografis Golput

Karakteristik Psikografis Golput	Persen
<b>Akses Media ( Persentase Yang Mengakses setiap hari atau minimal satu hari dalam seminggu)</b>	
Suratkabar	32.7
Radio	29.7
Televisi	71.3
<b>Partisipasi Sosial ( Persentase Yang Menjawab Sekalu / Lebih Dari Sekali Dalam Sebulan)</b>	
Ronda/jaga keamanan warga sekitar	41.2
Kerjabakti untuk kebersihan lingkungan	74.8
Hadir dalam pertemuan/rapat warga membicarakan masalah bersama	51.5
Menjadi panitia / pengurus suatu kegiatan yang diadakan oleh lingkungan sekitar	44.3
Menyumbang sejumlah uang untuk kegiatan yang diadakan oleh lingkungan sekitar	72.0
<b>Keanggotaan ( Persentase Yang Menjawab Anggota )</b>	
Organisasi keagamaan	9.2
Perhimpunan olah raga	11.5
Perhimpunan seni dan budaya	3.8
Serikat pekerja/buruh, atau kelompok tani/nelayan	6.2
Organisasi profesi	4.6
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	3.1
Partai politik	3.1

Sumber: Survei Golput Lingkaran Survei Indonesia ( N= 254)

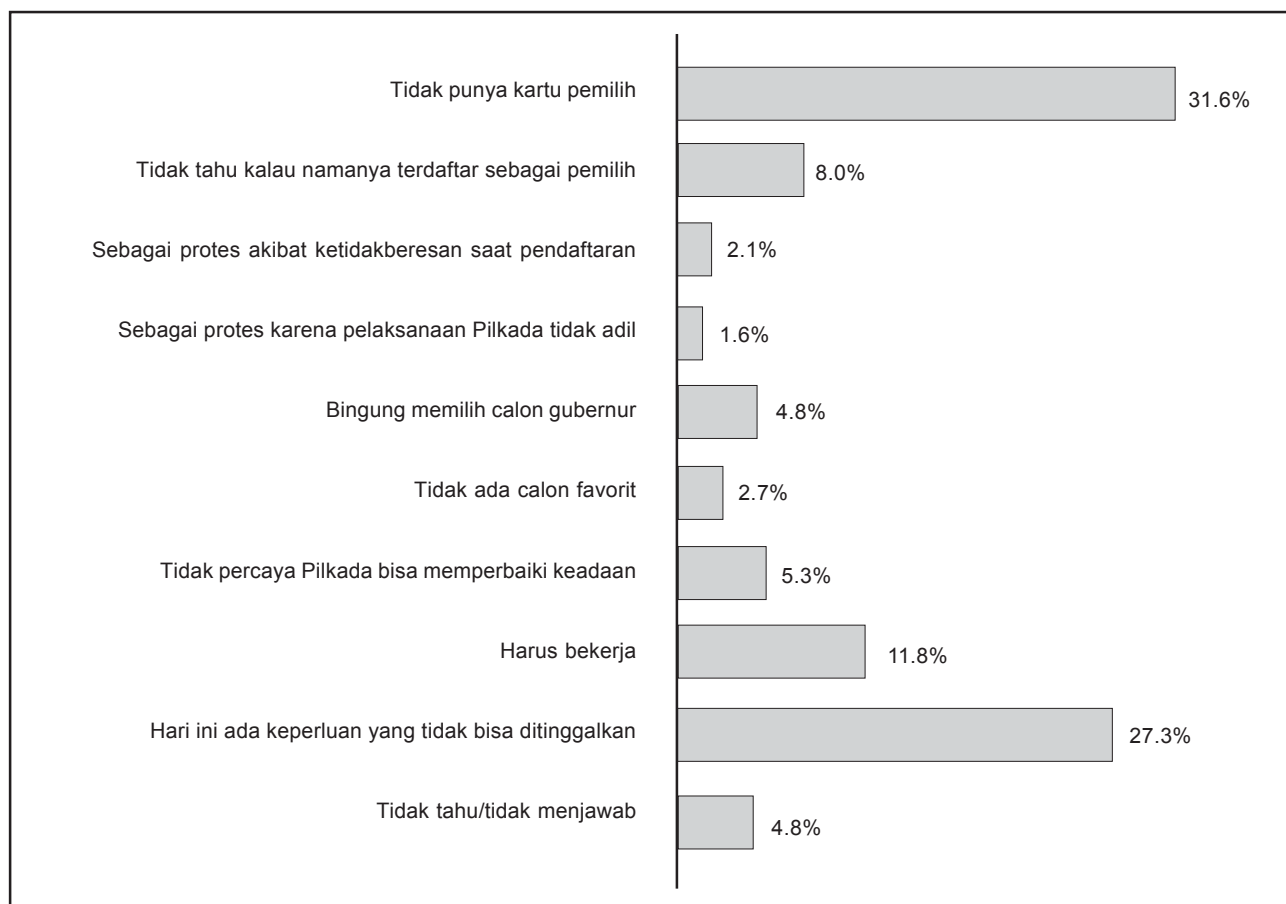
### 1) Golput karena alasan administratif

Riset yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ini memperlihatkan salah satu alasan terbesar seseorang memutuskan tidak memilih adalah alasan administratif. Banyak pemilih yang tidak tahu namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga tidak menggunakan suaranya pada hari pemilihan. Atau karena pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat kartu pemilih atau kartu undangan—bisa karena petugas tidak maksimal dalam mendistribusikan kartu pemilih, bisa juga akibat alamat yang terdapat dalam DPT tidak sesuai dengan alamat pemilih yang sebenarnya. Kekacauan administrasi pendaftaran pemilih ini menyebabkan banyak pemilih yang ingin menggunakan suaranya tetapi tidak terdaftar. Bisa juga pemilih tidak jadi

ikut pemilihan karena tidak tahu namanya tercantum dalam DPT ( Daftar Pemilih tetap).<sup>8</sup>

Administrasi pendaftaran pemilih terbukti bisa menentukan tinggi rendahnya partisipasi pemilih. Di negara-negara Eropa, umumnya tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Hal ini karena, Kebanyakan warga negara Eropa telah terdaftar secara otomatis dalam daftar pemilih dan daftar pemilih ini selalu diperbaharui oleh pemerintah. Oleh karena itu, presentase publik Eropa yang terdaftar sebagai pemilih menjadi lebih besar. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat Amerika harus mengambil inisiatif untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (Lihat Russel J. Dalton dan Martin P. Wattenberg, 1993).

<sup>8</sup> Riset ini menemukan sebanyak 38.6% orang yang golput akibat alasan administratif—tidak tahu nama terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap ) sebagai pemilih. Perlu dicatat, potensi golput akibat kesalahan administratif ini bisa lebih besar dari angka 38.6%. Mengapa? Karena riset ini hanya mencakup pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak menggunakan suaranya di hari pemilihan. Riset ini tidak mencakup calon pemilih yang mempunyai syarat, tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Sebagai perbandingan, penelitian yang dilakukan oleh LP3ES dan NDI menemukan, sebanyak 21% pemilih yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada DKI Jakarta tidak terdaftar. Jika ini diperhitungkan, angka golput akibat kekacauan administratif akan jauh lebih besar. Lebih lanjut mengenai penelitian LP3ES dan NDI mengenai audit pemilih Pilkada DKI Jakarta, lihat "Konferensi Pers: Hasil Audit Daftar Pemilih Pilkada DKI Jakarta 2007", bisa diakses di [www.lp3es.or.id](http://www.lp3es.or.id).

**Grafik 7: Alasan Tidak Ikut Memilih (N= 254)**

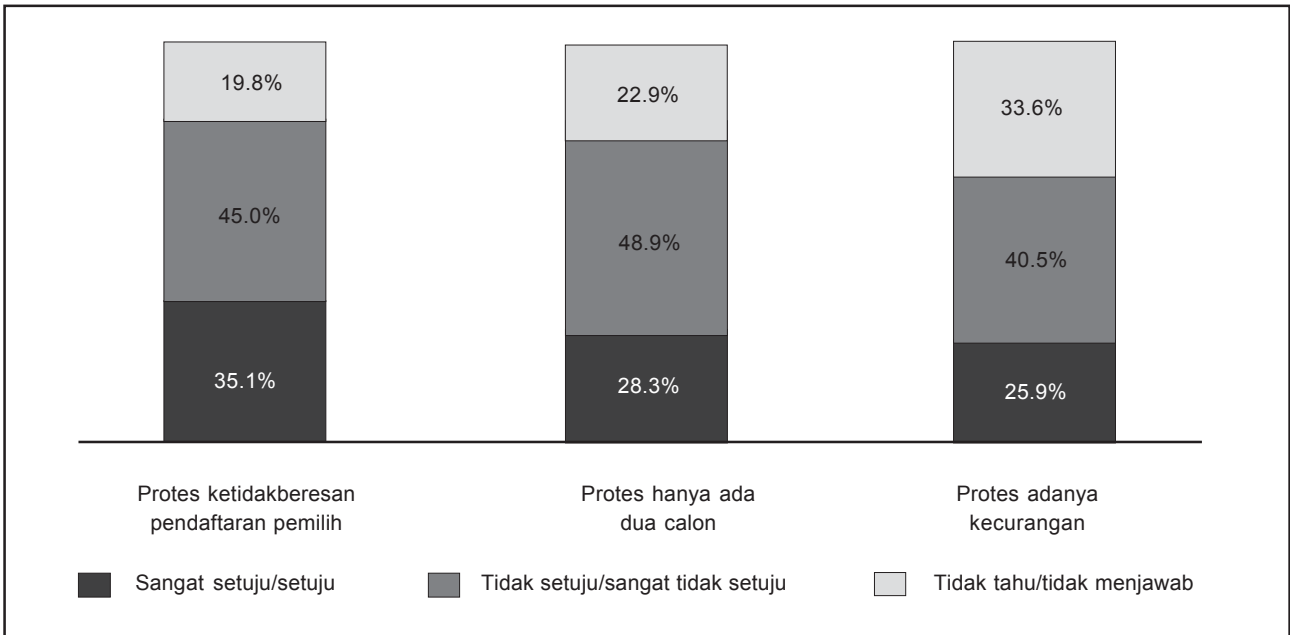
Q: Saat ini, apakah Ibu / Bapak memang mempunyai KARTU PEMILIH yang bisa digunakan untuk ikut memilih dalam Pilkada DKI Jakarta hari ini?; Q: Ibu / Bapak hari ini tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos. Kalau boleh tahu, apa alasan Ibu / Bapak tidak ikut memilih?

**Tabel 10: Kategori Golput**

Alasan Tidak Ikut Memilih	Kategori Alasan	Persen
Sakit, Ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan Harus bekerja	Alasan teknis individual	39.1%
Tidak percaya Pilkada tidak bisa memperbaiki keadaan Jakarta Tidak ada calon favorit Bingung memilih calon Gubernur yang mana Sebagai bentuk protes karena pelaksanaan Pilkada tidak adil Sebagai bentuk protes akibat ketidakberesan saat pendaftaran	Alasan politis	16.5%
Tidak terdaftar sebagai pemilih Tidak tahu kalau namanya terdaftar sebagai pemilih	Alasan administratif	38.6%

Sumber: Survei Golput Lingkaran Survei Indonesia ( N= 254)

**Grafik 8: Penilaian Terhadap Alasan Golput ( N= 254)**

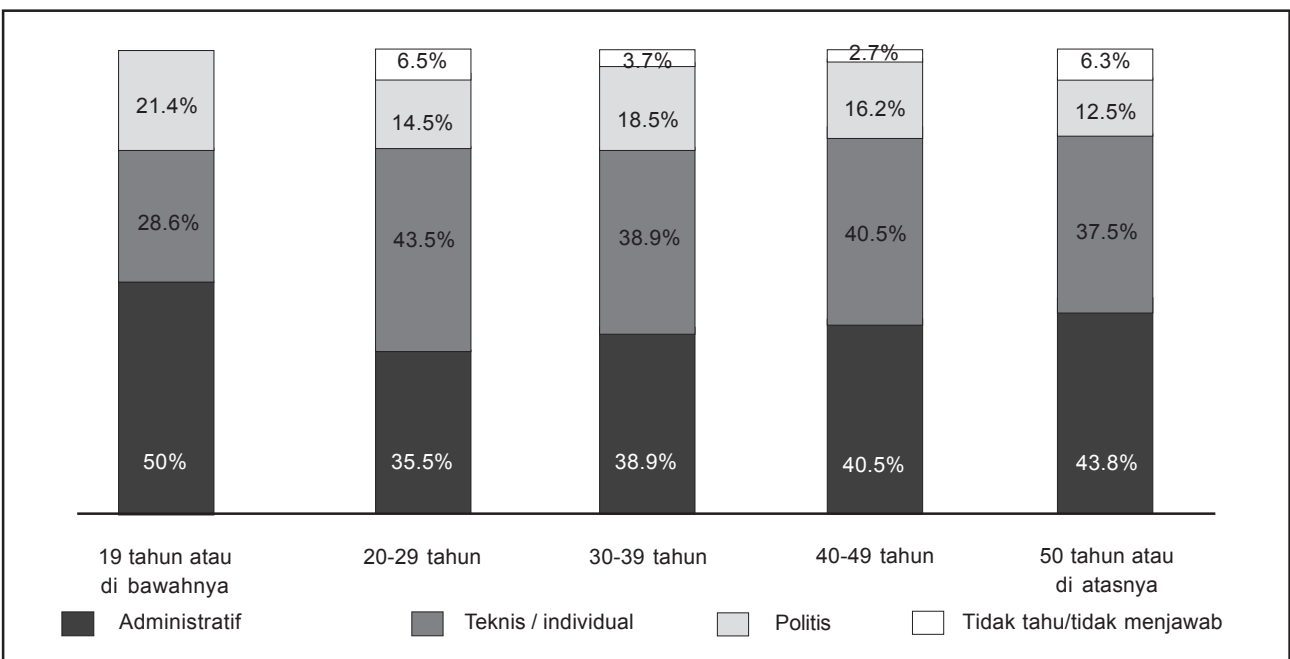


Q1: Ada pendapat yang menyatakan warga Jakarta bisa tidak ikut memilih dalam Pilkada sebagai bentuk PROTES akibat adanya ketidakberesan dalam hal pendaftaran pemilih. Seberapa setujuakah Ibu/Bapak dengan pendapat tersebut?

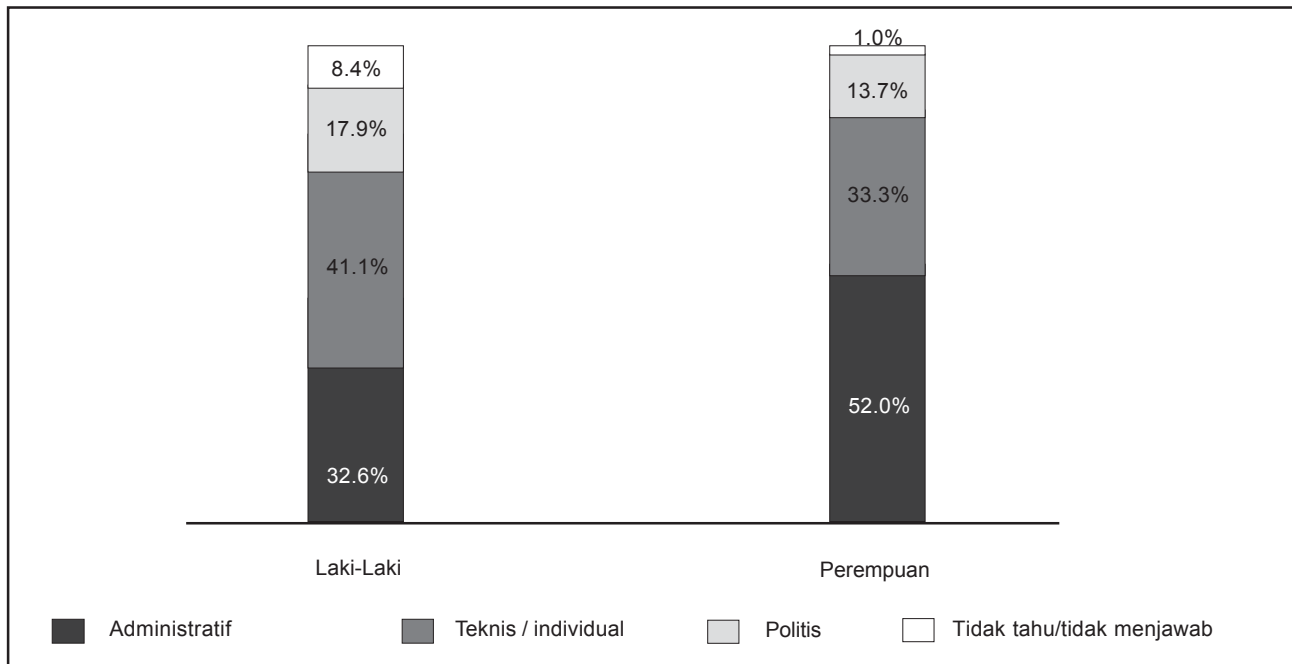
Q2: Ada pendapat yang menyatakan warga Jakarta bisa tidak ikut memilih dalam Pilkada sebagai bentuk PROTES akibat terbatasnya alternatif karena hanya ada dua calon gubernur / wakil gubernur yang maju dalam pemilihan. Seberapa setujuakah Ibu/Bapak dengan pendapat tersebut?;

Q3: Ada pendapat yang menyatakan warga Jakarta bisa tidak ikut memilih dalam Pilkada sebagai bentuk PROTES akibat adanya kecurangan selama pelaksanaan kampanye. Seberapa setujuakah Ibu/Bapak dengan pendapat tersebut?

**Grafik 9: Alasan Golput Menurut Usia ( N= 254)**



Grafik 10: Alasan Golput Menurut Jenis Kelamin ( N= 254)



Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengambil inisiatif melakukan pendaftaran pemilih, sebenarnya sudah benar.<sup>9</sup> Yang menjadi persoalan adalah daftar pemilih itu kualitasnya buruk—dari pemilih yang seharusnya terdaftar tetapi tidak terdaftar, atau adanya pemilih yang seharusnya tidak terdaftar (misalnya sudah meninggal, di bawah umur, sudah pindah dsb) tetapi terdaftar sebagai pemilih. Upaya mengurangi angka golput di masa mendatang hanya bisa dilakukan jikalau ada upaya yang serius untuk membenahi proses dan administrasi pendaftaran pemilih. Angka golput dalam Pilkada yang mencapai rata-rata 27.9% sebenarnya bisa diperkecil seandainya administrasi dan proses pendaftaran pemilih bisa dilakukan dengan baik. Hanya dengan data pemilih terdaftar akurat kita bisa memastikan tidak

ada lagi pemilih yang sebenarnya ingin menggunakan hak suaranya tetapi terganjal oleh kesalahan atau kecacuan administrasi.

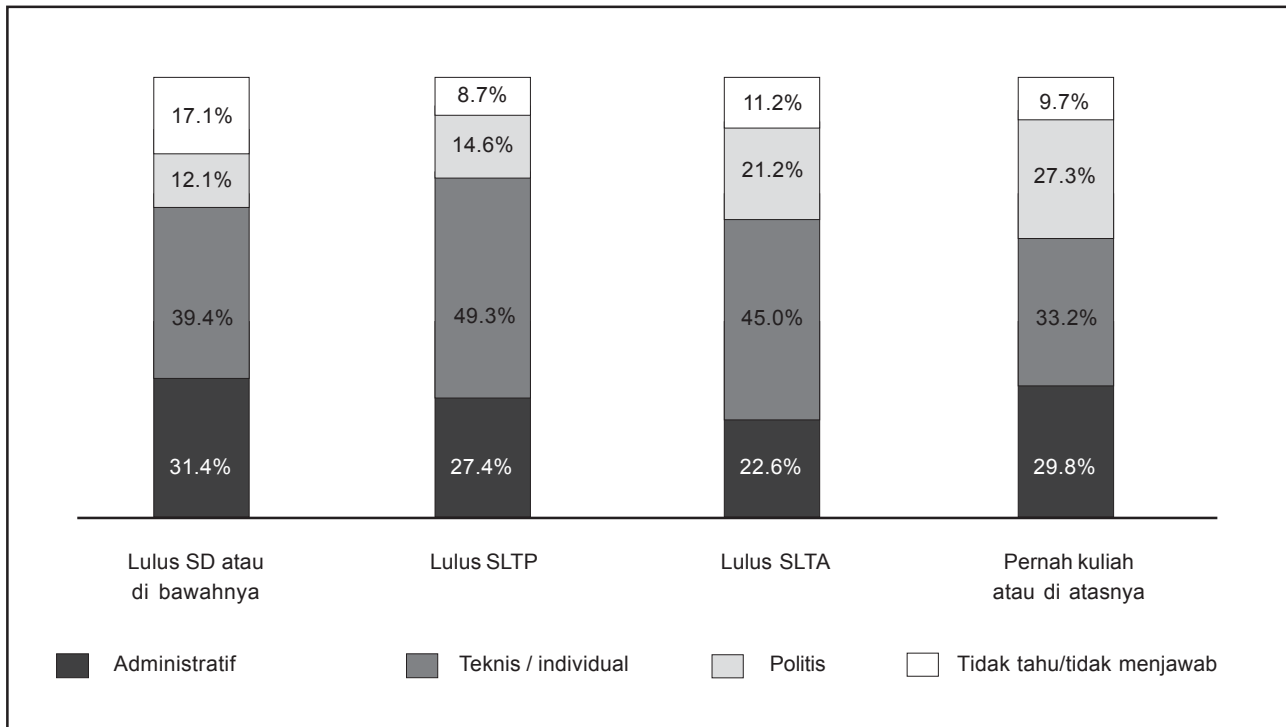
Ada dua masalah utama dalam proses administrasi pendaftaran pemilih selama pelaksanaan Pilkada. Pertama, pemilih yang seharusnya mempunyai hak pilih, tidak terdaftar (tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap / DPT).<sup>10</sup> Kedua, pemilih telah terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat kartu pemilih / surat undangan, sehingga tidak mengetahui kalau namanya masuk dalam DPT.<sup>11</sup> Apa kaitan antara tingginya angka golput selama Pilkada dengan buruknya administrasi pendaftaran pemilih? Mereka yang tidak memilih (golput) bisa jadi tidak benar-benar “berniat untuk golput”, tetapi lebih karena tidak

<sup>9</sup> Pendataan dan pendaftaran pemilih ini dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada Pemilu 2004 atas dasar *agreement* dan nota kesepahaman tiga institusi negara: KPU, Departemen Dalam Negeri dan BPS. Kerjasama ini dikenal dengan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan). Di sini, pemerintah mengambil inisiatif untuk mendata dan mendaftarkan pemilih, bukan warga yang diminta aktif untuk mendaftar sebagai pemilih.

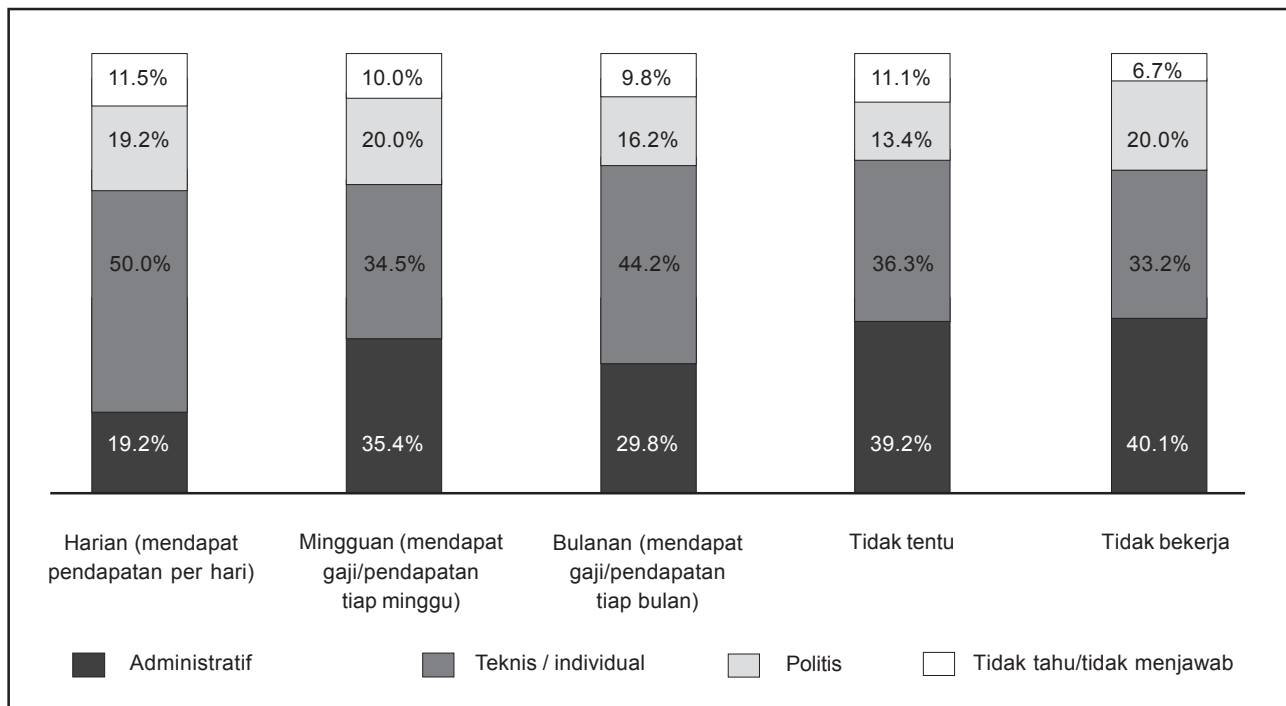
<sup>10</sup> Proses pendaftaran pemilih dalam Pilkada dilakukan oleh Dinas Kependudukan Provinsi atau Kabupaten / Kota dengan melakukan updating daftar pemilih pada saat Pemilu 2004. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Masalahnya, kerap kali validasi itu tidak dilakukan, akibatnya banyak pemilih tambahan yang tidak terdaftar. Atau validasi itu dilakukan dengan buruk, akibatnya muncul pemilih ganda (terdaftar dua kali atau lebih), pemilih di bawah umur, pemilih yang tidak jelas identitasnya, dan sebagainya.

<sup>11</sup> Masalah muncul ketika alamat yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak sesuai dengan alamat sesungguhnya. Atau petugas tidak maksimal dalam distribusi kartu pemilih, akibatnya banyak pemilih yang meski terdaftar tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih. Ini ditambah dengan terbatasnya waktu bagi pendaftaran dan penetapan pemilih. Tinjauan yang bagus mengenai masalah pendataan dan pendaftaran pemilih ini, lihat Irvan Mawardi, “Pilkada: Pemilihan Kacau data Sebuah Refleksi”, <http://www.jprr.or.id/content/view/99/43/>.

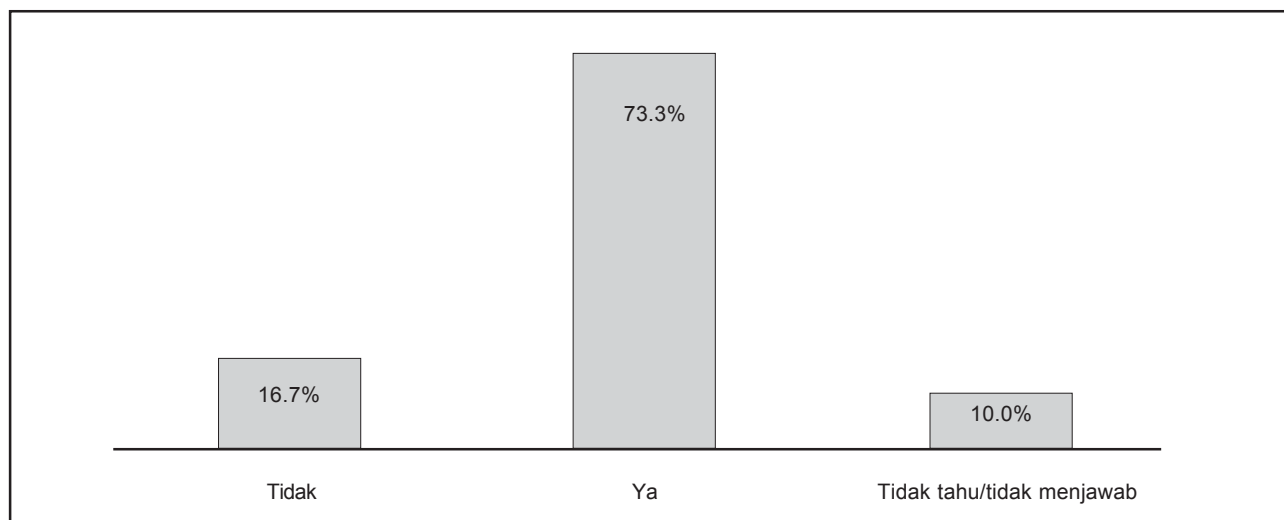
**Grafik 11: Alasan Golput Menurut Jenjang Pendidikan ( N= 254)**



**Grafik 12: Alasan Golput Menurut Jenjang Kategori Pekerjaan ( N= 254)**



**Grafik 13: Apakah Akan Memilih Jika Tahu Terdaftar Sebagai Pemilih ( N= 254)**



Q: Seandainya Ibu/Bapak tahu nama Ibu/Bapak terdaftar sebagai pemilih, apakah akan ikut memilih atau tidak?

mendapat kartu pemilih atau tidak tahu kalau namanya terdaftar sebagai pemilih. Jika administrasi pendaftaran pemilih ini bisa diperbaiki, angka golput kemungkinan bisa diperbaiki. Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan mereka yang tidak ikut memilih akan ikut memilih seandainya mereka mendapatkan kartu pemilih atau mendapat informasi nama mereka terdaftar sebagai pemilih (lihat grafik 13).

## 2) Golput karena alasan teknis / individual

Sebab lain dari golput adalah alasan teknis atau individual—seperti harus bekerja, sedang ada keperluan, sedang bepergian, berlibur dan sebagainya. Seseorang lebih mendahulukan keperluan pribadinya dibandingkan harus datang ke bilik suara. Tetapi perlu dicatat, penelitian ini dilakukan di Jakarta, dengan karakteristik tertentu yakni banyaknya warga pendatang. Daerah lain kemungkinan mempunyai pola golput yang berbeda.

Upaya membujuk pemilih ke bilik suara adalah tantangan bagi penyelenggara Pemilu di banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Upaya yang umum dilakukan adalah dengan menetapkan hari pemilihan sebagai hari libur. Atau hari pemilihan dibuat saat hari libur. Tujuannya agar pemilih mempunyai waktu luang untuk datang ke tempat pemungutan suara. Cara lain, dengan membuat aturan yang “memaksa” calon pemilih agar datang ke tempat pemungutan suara. Misalnya dengan memberi denda bagi calon pemilih yang tanpa alasan jelas tidak ikut dalam pemilihan.

Indonesia mungkin belum saatnya menerapkan sanksi bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Di masa

mendatang, yang bisa dilakukan oleh penyelenggara Pemilu / Pilkada adalah membuat mekanisme yang memungkinkan pemilih bisa memberikan suaranya semudah mungkin. Misalnya dengan mendirikan TPS (Tempat Pemungutan Suara) di tempat-tempat umum—pasar, pusat perbelanjaan atau tempat hiburan. Penyelenggara juga bisa membuat prosedur yang memudahkan pemilih memberikan suara di TPS di luar TPS di mana pemilih terdaftar.

## 3) Golput karena alasan politis

Penyelenggara Pemilu / Pilkada bisa melakukan intervensi untuk mengurangi angka golput di kalangan pemilih yang golput akibat alasan administratif dan teknis (individual). Tetapi tidak demikian dengan mereka yang golput akibat alasan politis—mereka yang tidak memilih akibat ketidakpercayaan dengan pemilihan atau calon yang maju dalam pemilihan. Ini sudah di luar jangkauan penyelenggara Pemilu / Pilkada. Pilkada yang makin kompetitif diantaranya dengan memperbolehkan majunya calon independen kemungkinan bisa mengurangi angka golput akibat alasan politis. **Eriyanto**

## Daftar Pustaka

- Dalton, Russel J. dan Martin P. Wattenberg, “The Not So Simple Act of Voting” dalam Ada W. Finifter (ed), *Political Science: The State of The Discipline*, Washington, American Political Science Association, 1993.
- IDEA, *Voter turnout Since 1945: A Global Report*, 2002.
- Norris, Pippa. *Elections and Voting Behaviour: New Challenges, New Perspectives*. Aldershot: Ashgate, Dartmouth, 1998.

## Golput: Seberapa Berdampak Bagi Perolehan Suara Kandidat?

DARI Pilkada yang telah lewat, ditandai dengan tingginya angka golput (pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya). Di sejumlah wilayah, bahkan angka Golput ini mencapai 50%. Artinya, Pilkada hanya diikuti oleh separoh saja dari pemilih yang terdaftar. Pertanyaan yang menarik adalah, seberapa berdampak golput ini bagi perolehan suara kandidat? Seandainya semua pemilih yang terdaftar tersebut menggunakan hak suaranya, bagaimana pengaruhnya bagi perolehan final suara kandidat? Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merancang riset khusus terhadap pemilih yang tidak ikut dalam pemilihan (golput) pada saat Pilkada DKI Jakarta, 8 Agustus 2007 lalu. Pilkada DKI Jakarta itu dimenangkan oleh pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto dengan suara 57.9%. Tingkat golput sebesar 36.2%. Seandainya 36.2% pemilih yang golput itu (sekitar 1.9 juta orang) itu memilih, apakah Fauzi Bowo dan Priyanto akan tetap menang? Apakah perolehan suara pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto lebih rendah ataukah lebih tinggi dari angka 57.9 persen? Survei golput yang dilakukan oleh LSI menunjukkan, mereka yang golput lebih banyak memilih pasangan Fauzi Bowo-Priyanto dibandingkan Adang Darajatun-Dani Anwar. Bahkan (jikalau hasil survei golput ini akurat), perolehan suara pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto lebih besar daripada saat ini. Pasangan ini diprediksikan akan mendapat suara 59.8% suara.

HINGGA saat ini, golput (pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya), belum mendapatkan perhatian serius dari kandidat, tim sukses dan para manajer kampanye (*campaign manager*). Mereka lebih banyak berkulat pada bagaimana strategi mempertahankan dukungan pada kandidat atau upaya menarik dukungan dari pendukung kandidat lain. Suara dari golput tidak banyak diperhitungkan atau paling tidak belum menjadi bagian dari strategi mereka. Padahal, suara dari mereka yang golput ini bisa sangat menentukan, bahkan potensial bisa mengubah kemenangan kandidat.

Ambil contoh Pilkada Kota Medan. Pilkada dimenangkan oleh pasangan Abdillah-Ramli Lubis dengan perolehan suara 62.23%. Sementara lawannya (pasangan Maulana Pohan-Sigit Pramono) mendapatkan suara 37.77%. Pilkada Kota Medan ini hanya diikuti oleh 54.7% pemilih.

Dengan kata lain, hampir separoh pemilih terdaftar tidak ikut memilih. Kita bisa berandai-andai. Seandainya mereka yang golput itu ikut memilih, apakah perolehan kandidat akan sama seperti di atas? Bisa jadi berbeda. Suara untuk pasangan Abdillah-Ramli Lubis bisa bertambah atau bisa berkurang. Bahkan bisa jadi bukan hanya perolehan suara yang berubah, tetapi juga komposisi pemenang akan berbeda. Suara 45.3% pemilih akan mempengaruhi hasil akhir dari Pilkada. Fakta semacam ini tidak banyak disadari oleh kandidat kepala daerah dan tim sukses.

Pengalaman pemilihan umum di sejumlah negara menunjukkan dengan sangat jelas, betapa pemilih golput ini memegang peranan kunci. Kemenangan atau kekalahan kandidat banyak ditentukan oleh seberapa berhasil kandidat memobilisasi pemilih yang tidak ikut pemilihan. Di Amerika misalnya. Basis tradisional dari Partai Republik

adalah pemilih Kristen Protestan dan Evangelis. Sementara basis dari Partai Demokrat adalah kalangan pekerja, warga kulit hitam dan hispanik. Kandidat presiden di Amerika Serikat bukan hanya harus menyiapkan strategi menarik dukungan pemilih, tetapi juga merancang strategi bagaimana agar pemilih tradisional itu akan datang ke tempat pemungutan suara. Warga kulit hitam misalnya, secara tradisional selalu mendukung kandidat presiden yang berasal dari Partai Demokrat. Tetapi dukungan ini tidak berguna jika warga kulit hitam itu tidak ikut memilih. Kandidat presiden dan tim sukses lalu akan membuat strategi agar pemilih tradisional itu bisa datang ke tempat pemungutan suara. Di Amerika, upaya mobilisasi pemilih ini dikenal sebagai *Get Out the Vote* (GOTV). Tim sukses akan mendatangi atau menelepon calon pemilih, dan membujuk mereka agar datang di hari pemilihan (lihat Donald P. Green dan Alan S. Gerber, 2004).

Kemenangan George W Bush dalam Pemilu Presiden di Amerika tahun 2004, diyakini oleh banyak pengamat (lihat Ari A. Perdana, 2004) karena keberhasilan Bush dan tim kampanyenya dalam memobilisasi suara di kalangan pemilih tradisional Partai Republik. Sebelum pemilihan, survei sejumlah lembaga justru menempatkan John Kerry yang akan menenangkan pemilihan. Menjelang pemilihan tim sukses Bush berhasil memobilisasi warga Kristen Protestan dan Evangelis yang jumlahnya hampir 60 persen pemilih. Mereka inilah yang diyakini memegang peranan penting dalam menambah suara bagi Bush.

Pemilu di Prancis tahun 2002 adalah contoh lain yang menarik. Pemilu Presiden tahun 2002 putaran pertama memunculkan nama Presiden Jacques Chirac dan tokoh sayap kanan Jean-Marie Le Pen. Keberhasilan Le Pen maju dalam putaran kedua, tidak banyak diperkirakan. Sebelumnya, pengamat dan jajak pendapat memprediksikan yang maju dalam putaran kedua adalah Presiden Jacques Chirac dan PM Lionel Jospin. Faktanya, Jacques Chirac memperoleh suara 19.88%, Lionel Jospin hanya mendapat 16.18%, dan Le Pen memperoleh 16.86%. Para analis melihat dua alasan yang menyebabkan mengapa tokoh sayap kiri Le Pen, bisa menang dan maju ke putaran dua. Pertama, terbelahnya suara yang mendukung kandidat dari tokoh kiri akibat banyaknya kandidat kiri dalam Pemilu yang terdiri tidak kurang 16

kandidat. Kedua, rendahnya partisipasi pemilih. Pemilu putaran pertama itu hanya diikuti oleh 70 persen pemilih. Le Pen adalah tokoh kontroversial dan dibenci banyak orang. Ia dipandang rasis dan anti imigran.<sup>1</sup> Masalahnya, pemilih yang membenci Le Pen banyak yang tidak datang ke tempat pemungutan suara—terutama pemilih dari kalangan imigran. Ketidakhadiran pemilih dari kelompok ini justru menguntungkan Le Pen.

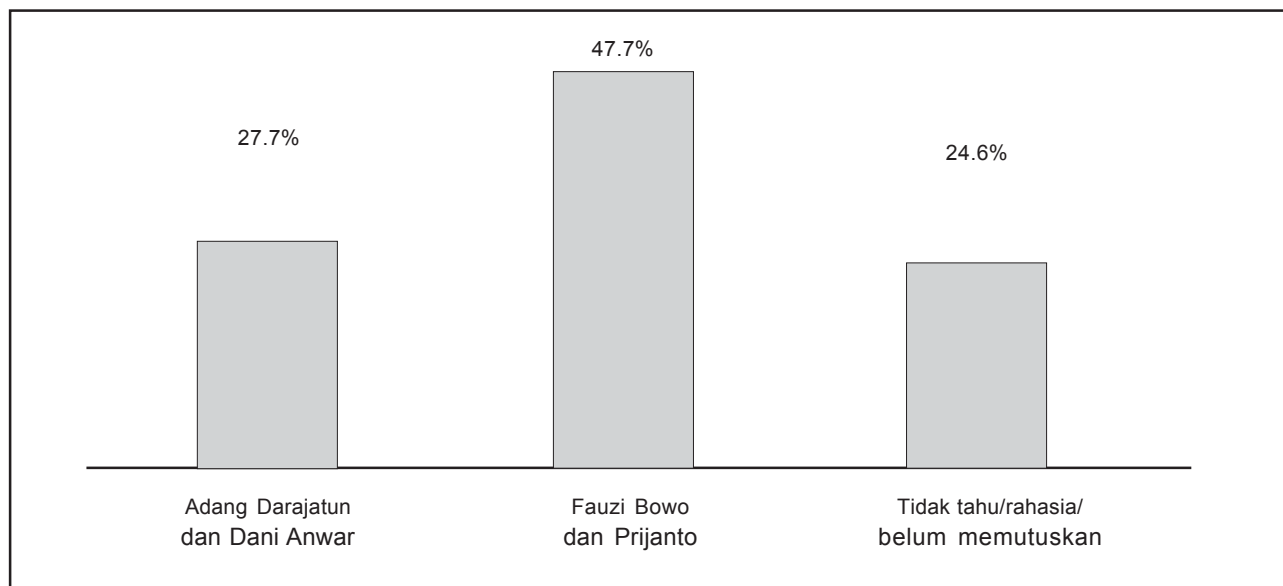
Kondisi ini dimanfaatkan oleh Jacques Chirac pada Pemilu Presiden putaran kedua. Chirac dan tim suksesnya menyerukan agar mereka yang tidak ingin Le Pen menjadi presiden agar tidak sebatas bicara dan demonstrasi. Mereka harus menunjukkannya di bilik suara. Sejumlah demonstrasi digelar menentang Le Pen. Tidak ketinggalan sejumlah pemain sepakbola tim nasional Prancis yang sebagian besar adalah imigran, meminta agar pemilih memadati bilik suara dan memilih Jacques Chirac. Hasilnya, pada Pemilu putaran kedua ini Chirac memperoleh 82% suara—kemenangan terbesar sepanjang sejarah Pemilu Perancis.

#### **Pengalaman Pilkada DKI Jakarta**

Golput, secara natural merupakan ekspresi politik yang biasa dari setiap warga negara. Sebagai hak politik, Golput merupakan hak para warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kapan besaran angka golput kian memiliki makna yang signifikan? Pertama, ketika konteks kepentingan kolektif dan muatan politik muncul dibalik besaran angka Golput dilihat secara diametral dengan struktur dan legitimasi rezim penguasa otoriter. Pengalaman di Indonesia selama rezim Orde Baru, besaran angka golput menjadi semakin memiliki arti penting bagi rezim penguasa. Oleh karena itu, rezim akan terus berupaya keras bagaimana meminimalisir besaran angka Golput. Bahkan terkesan rezim phobia terhadap golput yang dianggap akan potensial merongrong kekuasaan Orde Baru.

Kedua, dalam konteks era demokrasi langsung dimana pemilu legislatif, pemilu presiden-wakil presiden dan Pilkada, besaran angka golput telah menjadi faktor penting dalam perolehan kursi legislatif (DPR RI dan DPRD), kemenangan Pilpres dan kemenangan Pilkada. Derajat fluktuasi angka Golput menjadi kian menentukan

<sup>1</sup> Sikap dan program kerja Le Pen dan Front Nasional (FN) cukup menakutkan bagi para pemilih. Le Pen menyatakan dengan jelas bahwa ia anti-imigran. Ia mengatakan untuk segera menyuruh keluar imigran gelap, membatasi hak mencari suaka, dan mendahulukan orang Perancis di semua bidang. Le Pen juga menyatakan ingin keluar dari Uni Eropa (UE), memberlakukan kembali mata uang franc yang tergeser oleh euro, dan berniat mengembalikan apa yang disebutnya sebagai prestige Prancis. Dikutip dari [id.wikipedia.org/wiki/Jacques\\_Chirac](http://id.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac).

**Grafik 1: Kandidat Kepala Daerah Yang Dipilih oleh Pemilih Golput**

Sumber: Survei Golput Pilkada DKI Jakarta, Lingkaran Survei Indonesia ( N = 254) Q: Seandainya Ibu / Bapak hari ini ikut dalam Pilkada. Dari 2 pasangan CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR berikut, siapa yang akan ibu/bapak pilih? Q2: Kalau “tidak tahu” atau “rahasia”, di antara 2 pasangan CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR tersebut mana yang paling pantas didukung menjadi Gubernur / wakil gubernur DKI Jakarta? Q3: Kalau “tidak tahu” atau “rahasia”, di antara 2 pasangan CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR tersebut mana yang paling Ibu / Bapak SUKAI menjadi Gubernur / wakil gubernur DKI Jakarta?

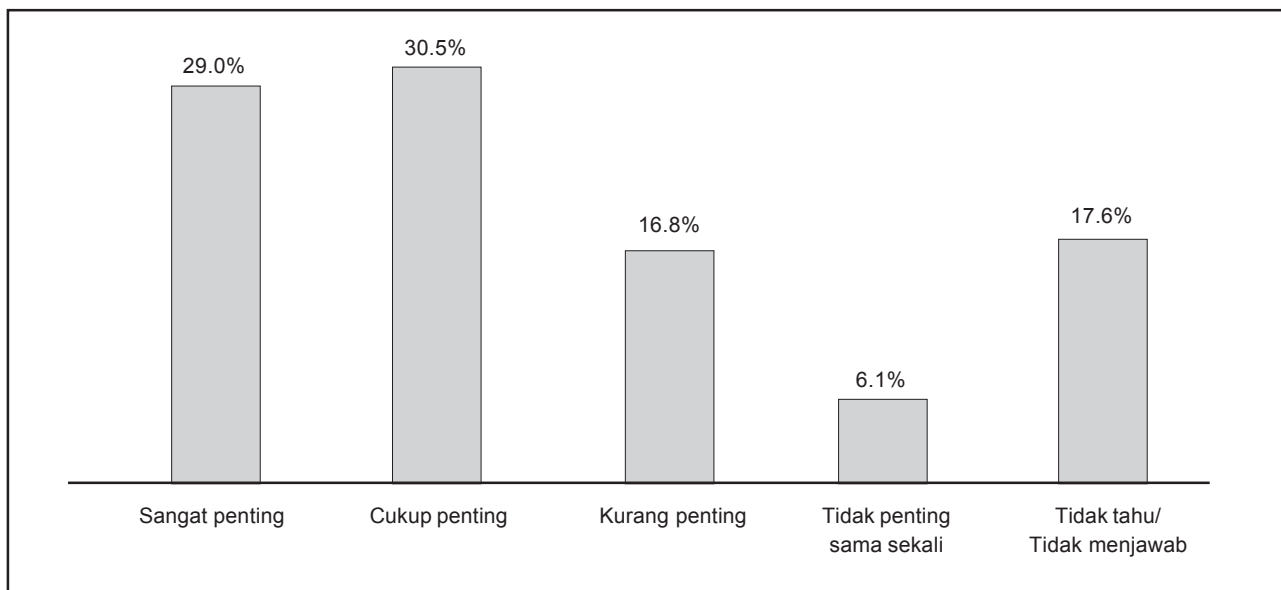
**Tabel 1: Angka Proksimasi Dukungan Pasangan Kepala Daerah di Kalangan Golput**

Kandidat	Hasil Survei	Angka Proksimasi
Adang Darajatun dan Dani Anwar	27.7%	36.73%
Fauzi Bowo dan Prijanto	47.7%	63.28%
Tidak Tahu /Tidak jawab / Rahasia / Belum Memutuskan	24.6%	0
Total	100%	100%

Keterangan: angka proksimasi dihitung dengan membagi suara “belum tahu/rahasia/tidak menjawab/belum memutuskan” secara proporsional.

**Tabel 2: Simulasi Perhitungan Perolehan Suara Jika Angka Golput 0%.**

Kandidat	Hasil Aktual Pilkada (Partisipasi pemilih 63.8%)	Prediksi Jika Partisipasi Pemilih 100% (Semua Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya)
Adang Darajatun dan Dani Anwar	57.9%	59.8%
Fauzi Bowo dan Prijanto	42.1%	40.2%

**Grafik 2: Arti Penting Keikutsertaan Dalam Pilkada Menurut Responden**

Q: Menurut penilaian Ibu / Bapak, seberapa penting keikutsertaan Ibu / Bapak dalam menentukan kemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur pilihan Ibu / Bapak? ( N = 254)

**Tabel 3: Keyakinan Pasangan Kepala Daerah Pilihan Akan Memenangkan Pilkada**

KATEGORI JAWABAN	Pemilih Darajatun-Dani Anwar	Pemilih Fauzi Bowo-Priyanto
	Q: Seandainya Ibu / Bapak ikut Pilkada hari ini, Ibu / Bapak akan memilih pasangan Adang D dan Dani Anwar. Seberapa Ibu / Bapak yakin kalau pasangan Adang dan Dani Anwar akan memenangkan Pilkada hari ini?	Q: Seandainya Ibu / Bapak ikut Pilkada hari ini, Ibu / Bapak akan memilih pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto. Seberapa Ibu / Bapak yakin kalau pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto akan memenangkan Pilkada hari ini?
Sangat yakin / cukup yakin	55.6%	87.5%
Kurang yakin /tidak yakin sama sekali	28.9%	10.4%
Tidak tahu /tidak jawab	15.6%	2.1%

Keterangan : Pertanyaan mengenai Adang Darajatun - Dani Anwar hanya ditanyakan kepada pemilih yang menjawab akan memilih Adang Darajatun - Dani Anwar . Demikian juga pertanyaan mengenai Fauzi Bowo dan Priyanto, hanya ditanyakan kepada pemilih pasangan ini. Sumber: Survei Golput, Lingkaran Survei Indonesia (N =254)

**Tabel 4: Penilaian Atas Arti Penting Suara Pemilih Bagi Kemenangan Kandidat**

KATEGORI JAWABAN	Pemilih Darajatun-Dani Anwar	Pemilih Fauzi Bowo-Priyanto
	Q: Ada orang yang berpendapat seharusnya pasangan Adang Darajatun dan Dani Anwar bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta JIKA orang seperti Ibu / Bapak ikut serta dalam Pilkada. Seberapa Ibu/ Bapak setuju dengan pendapat tersebut?	Q: Ada orang yang berpendapat seharusnya pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta JIKA orang seperti Ibu / Bapak ikut serta dalam Pilkada. Seberapa Ibu/ Bapak setuju dengan pendapat tersebut?
Sangat setuju/setuju	46.7%	83.3%
Tidak setuju/sangat tidak setuju	8.9%	8.3%
Tidak tahu/tidak jawab	44.4%	8.3%

Keterangan : Pertanyaan mengenai Adang Darajatun - Dani Anwar hanya ditanyakan kepada pemilih yang menjawab akan memilih Adang Darajatun - Dani Anwar . Demikian juga pertanyaan mengenai Fauzi Bowo dan Priyanto, hanya ditanyakan kepada pemilih pasangan ini. Sumber: Survei Golput, Lingkaran Survei Indonesia (N =254)

**Tabel 5: Penilaian Apabila Pasangan Kepala Daerah Pilihan Kalah Dalam Pilkada**

KATEGORI JAWABAN	Pemilih Darajatun-Dani Anwar	Pemilih Fauzi Bowo-Priyanto
	Q: Seandainya Ibu / Bapak ikut Pilkada hari ini, Ibu / Bapak akan memilih pasangan Adang Darajatun dan Dani Anwar. Seandainya yang menjadi pemenang Pilkada adalah pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto, bagaimana perasaan Ibu /Bapak? Apakah Ibu / Bapak akan.....?	Seandainya Ibu / Bapak ikut Pilkada hari ini, Ibu / Bapak akan memilih pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto. Seandainya yang menjadi pemenang Pilkada adalah pasangan Fauzi dan Priyanto, bagaimana perasaan Ibu /Bapak? Apakah Ibu/ Bapak akan.....?
Menyesal, karena seharusnya pasangan..... bisa menang kalau orang seperti saya ikut memilih	13.0%	10.4%
Biasa saja	47.8%	58.3%
Tidak menyesal, kalau saya ikut memilih belum tentu pasangan.....pasti menang	17.4%	18.8%
Tidak tahu /tidak jawab	21.7%	12.5%

Keterangan : Pertanyaan mengenai Adang Darajatun - Dani Anwar hanya ditanyakan kepada pemilih yang menjawab akan memilih Adang Darajatun - Dani Anwar . Demikian juga pertanyaan mengenai Fauzi Bowo dan Priyanto, hanya ditanyakan kepada pemilih pasangan ini. Sumber: Survei Golput, Lingkaran Survei Indonesia (N =254)

ketika kompetisi antar kandidat berada dalam selisih angka yang kecil. Kompetisi antar kandidat dan partai politik kian sengit dalam ketiga jenis arena pemilu tersebut.<sup>2</sup>

Dalam terminologi ilmu politik, golput seringkali disebut dengan *non-voter*. Terminologi ini menunjukkan besaran angka yang dihasilkan dalam event pemilu di luar *voter turnout*. Fenomena *voter* dan *non-voter* ini menjadi fokus utama studi *voting behavior* yang berkembang dalam ilmu politik. Ada beberapa kategori para pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (*non-voters*). Menurut Louis DeSipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2006 : 8) kategori *non-voter* meliputi:

- *Registered Not Voted* : yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih.
- *Citizen-not Registered* : yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih.
- *Non-Citizen* : Mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih.

Untuk mengukur seberapa berdampak suara golput ini bagi kemenangan atau kekalahan kandidat, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan survei golput. Survei dilakukan di Pilkada DKI Jakarta, Agustus 2007. Survei ini bukan survei pra pemilihan, yang dilakukan sebelum Pilkada digelar. Sampel responden diambil dari pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan pada hari pelaksanaan, tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Dengan demikian, survei ini hanya menyertakan orang yang benar-benar golput / tidak ikut memilih. Kepada responden ditanyakan, seandainya mereka ikut memilih, pasangan mana yang akan dipilih. Hasilnya, sebanyak 47.7% responden memilih pasangan Fauzi Bowo-Priyanto. Sementara pasangan Adang Darajatun-Dani Anwar dipilih oleh 27.7% responden. Sebanyak 24.6% responden yang lain mengatakan tidak tahu atau tidak mau menjawab. (lihat Grafik 1)

Hasil survei menunjukkan, pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto paling dirugikan oleh adanya golput. Sebab di kalangan pemilih terdaftar yang tidak ikut memilih tersebut, sebagian besar mendukung mereka. Jikalau angka golput bisa lebih kecil, perolehan suara kandidat ini kemungkinan akan lebih besar dari angka 57.9%.

Pilkada DKI Jakarta lalu diikuti oleh 3.7 juta pemilih dari total pemilih terdaftar sebanyak 5.7 juta orang. Angka golput dalam Pilkada DKI Jakarta lalu mencapai 36.2%.<sup>3</sup> Angka golput ini terbilang "lumayan kecil" karena sebelum Pilkada digelar, banyak yang memperkirakan angka golput Pilkada DKI Jakarta di atas 50%. Seandainya angka golput di atas 50%, maka yang paling dirugikan adalah pasangan Fauzi Bowo dan Priyanto. Karena di kalangan pemilih terdaftar yang tidak ikut memilih ini, mayoritas mendukung Fauzi Bowo dan Priyanto. Dukungan mereka tidak akan bermakna jikalau tidak diwujudkan dengan datang ke tempat pemungutan suara.

Kita bisa membuat "simulasi" prediksi, apa yang akan terjadi seandainya semua pemilih datang di hari pemilihan. Bagaimana perolehan suara masing-masing kandidat seandainya 36.2% orang yang golput itu ikut memilih. Kita tidak punya data populasi siapa kepala daerah pilihan di kalangan pemilih golput ini. Yang kita punyai adalah data hasil survei (sampel). Jadi yang bisa dilakukan adalah membuat perkiraan dengan menggunakan data hasil survei. Hasil survei masih menyertakan kategori jawaban " tidak tahu / tidak jawab/ rahasia/ belum memutuskan". Kita pertama kali harus melakukan proksimasi dengan membagi secara proporsional persentase suara *non attitude* ini ke dalam suara pasangan kepala daerah. Hasil proksimasi menunjukkan pasangan Adang dan Dani memperoleh suara 36.2% dan pasangan Fauzi dan Priyanto memperoleh suara 63.3% (lihat Tabel 1). Hasil survei ini kita masukkan ke dalam hasil aktual Pilkada. Jika pilihan dari 36.7% pemilih (hasil survei) itu dimasukkan ke dalam hasil aktual, maka diprediksikan pasangan Fauzi dan Priyanto memperoleh suara 59.8% dan pasangan Adang Darajatun dan Dani Anwar memperoleh suara 40.2%. Dengan kata lain, seandainya

<sup>2</sup> Pada arena Pemilu legislatif, kompetisi nampak terutama dalam menembus angka Electoral Threshold (ET) dan perebutan syarat untuk mendapatkan kursi DPR dan DPRD di setiap daerah pemilihan (Dapil). Oleh karena itu, dalam pemilu 1999 dan 2004, kadangkala beberapa partai mampu mendapatkan jumlah kursi lebih besar kendatipun dari total jumlah suara pemilu legislatif yang diperolehnya lebih kecil dari partai-partai yang menjadi kompetitornya. Di sini *electoral vote* lebih menentukan dibandingkan *total vote*. Dalam Pemilu Presiden (Pilpres), total perolehan suara (*total vote*) adalah yang paling menentukan kemenangan pasangan kandidat. Hal yang sama juga berlaku dalam Pilkada dimana *total vote* yang akan menjadi penentu. Dalam hitungan electoral vote maupun *total vote*, keberadaan golput (*non-voter*) menjadi sangat menentukan. Sebab, besaran angka *non-voter* ini memiliki keterkaitan secara erat dan langsung dengan kompetitor lainnya (kandidat atau partai politik). Sebagai misal, seorang kandidat—dalam Pilpres atau Pilkada—jika kehilangan 10 % suara berarti angka tersebut sekaligus memberikan peluang peningkatan perolehan suara kepada kandidat lainnya maksimal sebesar 10 %.

semua pemilih yang terdaftar ikut memilih dalam Pilkada lalu, perolehan suara pasangan Fauzi dan Priyanto akan memperoleh suara lebih besar dari angka yang diperoleh sekarang (57.9%).

### Kesadaran di Kalangan Pemilih

Gambaran Pilkada DKI Jakarta di atas memperlihatkan suara golput bisa berpengaruh terhadap perolehan suara kandidat. Apalagi jikalau perolehan suara masing-masing kandidat ketat. Kekalahan dan kemenangan kandidat bisa dipastikan akan turut ditentukan oleh seberapa banyak pemilih yang tidak datang di hari pemilihan (golput). Jika pemilih yang tidak datang ini berasal dari kantong-kantong suara kandidat tertentu, bisa dipastikan dampaknya bagi perolehan suara keseluruhan dari kandidat. Fakta ini seharusnya bisa menyadarkan kandidat dan tim sukses agar memperhatikan golput sebagai aspek penting yang ikut menentukan kemenangan atau kekalahan kandidat.<sup>3</sup>

Yang menarik, minimnya kesadaran akan pentingnya suara golput ini bukan hanya terjadi di kalangan elit, tetapi juga pemilih. Pemilih memang berpandangan suara mereka bisa menentukan kemenangan atau kekalahan kandidat (lihat Grafik 2, Tabel 3, Tabel 4). Tetapi mereka

akan "biasa saja" jika seandainya pasangan lawan yang menang (lihat tabel 5). Fenomena seperti dalam kasus Pemilu Amerika 2004 dan Pemilu Prancis 2002—pemilih khawatir jikalau kandidat lawan yang menang, dan karena itu berbondong-bondong datang ke pemilihan—tidak terjadi dalam konteks Pilkada di Indonesia. Paling tidak pada Pilkada DKI Jakarta lalu. **(Eriyanto/ Sukanta/Ahmad Nyarwi)**

### Daftar Pustaka

- Green, Donald P. dan Alan S. Gerber, *Get Out the Vote: How to Increase Voter Turnout*, Brookings Institution Press, 2004.
- Lingkar Survei Indonesia, *Hasil Survei Golput*, Agustus 2007
- Louis DeSipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout, "The Changing Non-Voter: What Differentiates Non-Voters and Voters in Asia American and Latino Communities?", *Jurnal Center for Study of Democracy*, University of California, 2006.
- Perdana, Ari A, "Moralitas dan Pemilu AS", *Kompas*, 9 November 2004
- Wikipedia, Get Out the Vote, [en.wikipedia.org/wiki/Get\\_out\\_the\\_vote](http://en.wikipedia.org/wiki/Get_out_the_vote)

<sup>3</sup> Angka golput ini dihitung dari jumlah suara sah dibagi dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika suara yang tidak sah diperhitungkan, angka Golput dalam Pilkada DKI Jakarta mencapai 34.6%.

**PEMIMPIN UMUM**

Denny JA

**REDAKSI**

Eriyanto (Ketua)

Widdi Aswindi

Eka Kusmayadi

Ridwan Susanto

Arman Salam

Redaktur Tamu: Bagus Sartono &amp; Ahmad Nyarwi

**LINGKARAN SURVEI INDONESIA (LSI)**

Jl. Raya Venesia EB 1, Kompleks Bukit Gading Mediterania

Kelapa Gading, Jakarta Utara

Telp (021) 4514701, 4514704, Fax (021) 45858035, 4587336

[www.lsi.co.id](http://www.lsi.co.id)

Kajian ini diterbitkan tiap awal bulan. Kajian bulanan berisi tentang analisis fenomena sosial politik di Indonesia berdasarkan database dan survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia. Diperbolehkan memperbanyak atau mengutip bagian dari kajian bulanan ini, dengan menyebut sumber tulisan. Untuk permintaan berlangganan (gratis) kajian bulanan ini, bisa menghubungi Ika Pratiwi (email: [pratiwiika@yahoo.com](mailto:pratiwiika@yahoo.com)). Lingkaran Survei Indonesia (LSI) adalah perusahaan profesional yang mengkhususkan diri pada kegiatan riset opini publik—baik survei politik (nasional, lokal) maupun survei untuk kalangan bisnis. Selain riset, LSI juga konsultan politik bagi kepala daerah, partai politik ataupun politisi.